PT INFO TEKNO SIAGA

LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED AS OF DECEMBER 31, 2025
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

These Financial Statements are Originally issued in Indonesian Language

PT INFO TEKNO SIAGA | ***PT INFO TEKNO SIAGA***

DAFTAR ISI | ***TABLE OF CONTENTS***

	Halaman / *Pages*	
Surat Pernyataan Direksi		*Board of Directors' Statement*
Laporan Auditor Independen	i - iv	*Independent Auditors' Report*
Laporan Posisi Keuangan	1 - 2	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	4	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	5	*Statement of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan	6 - 34	*Notes to Financial Statements*

****

adapundi

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2025

PT INFO TEKNO SIAGA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: / *I, the undersigned:*

Nama	Achmad Indrawan	*Name*
Jabatan	Direktur Utama/ *President Director*	*Position*
Alamat	Capital Place Building Lantai 47 Suite B	*Address*
Nomor Telepon	(021) 50860666	*Telephone number*

Menyatakan bahwa: / *Declare that:*

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Info Tekno Siaga; / *I am responsible for the preparation and presentation of PT Info Tekno Siaga' financial reports;*

2. Laporan keuangan PT Info Tekno Siaga telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; / *The financial statements of PT Info Tekno Siaga have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*

3a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Info Tekno Siaga telah dimuat secara lengkap dan benar; / *All Information in the financial statements of PT Info Tekno Siaga have been completely and properly disclosed;*

3b. Laporan keuangan PT Info Tekno Siaga tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; / *The financial statements of PT Info Tekno Siaga do not contain incorrect information or material fact, and do not omit information or material fact;*

4. Saya bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Info Tekno Siaga. / *I am responsible for the internal control system within PT Info Tekno Siaga.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya / *Thus this statement is made truthfully.*

Jakarta, 23 April 2026/ *Jakarta April 23, 2026*

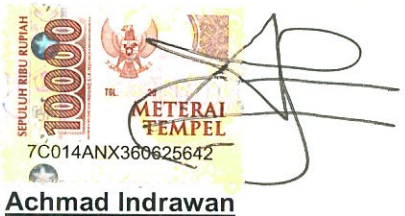

Achmad Indrawan
Direktur Utama/ *President Director*

McMillanWoods

These financial statements are originally issued
In Indonesia language

Laporan Auditor Independen

Laporan No: 00074/3.0360/AU.1/06/1806-1/1/IV/2026

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

PT INFO TEKNO SIAGA

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PT Info Tekno Siaga** ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

Report No: 00074/3.0360/AU.1/06/1806-1/1/IV/2026

The Shareholders, Commissioner and Directors

PT INFO TEKNO SIAGA

Opinion

*We have audited the accompanying financial statements of **PT Info Tekno Siaga** ("the Company"), which consist of the statement of financial position as of December 31, 2025, and the statement of income and other comprehensive income, the statement of changes in equity, and the statement of cash flows for the year then ended, as well as the notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.*

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the Company's financial position as of December 31, 2025, as well as its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Auditing Standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditor's Responsibilities for the Audit of Financial Statements" section of our report. We are independent of the Company in accordance with the relevant ethical requirements for audits of financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with those requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

RAMA WENDRA
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

Ruko Malibu Blok. D6
Jl. Pahlawan Seribu, BSD
Tangerang Selatan 15321

Telp. : 0811-1088-8812
e-mail : admin@ramawendra-tng.co.id
web : www.ramawendra-tng.co.id

Licensed No. : 1271/KM.1/2017

Penekanan Suatu Hal

Kami menarik perhatian pada Catatan 31 atas Laporan Keuangan yang menjelaskan bahwa Perusahaan menerima surat putusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan nomor perkara 05/KPPU-I/2025 tertanggal 26 Maret 2026. Putusan tersebut menetapkan bahwa Perusahaan wajib membayar denda sebesar Rp10.600.000.000 (sepuluh miliar enam ratus juta rupiah).

Atas putusan tersebut, Perusahaan telah mengajukan upaya hukum keberatan pada tanggal 8 April 2026 melalui surat nomor 24/Misc/IV/26/NM. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, belum ada keputusan lebih lanjut terkait upaya hukum dimaksud.

Emphasis on Something

We draw attention to Note 31 of the Financial Statements, which states that the Company received a decision letter from the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) regarding case number 05/KPPU-I/2025 dated March 26, 2026. The decision stipulates that the Company is required to pay a fine of Rp10,600,000,000 (ten billion six hundred million rupiah).

In response to this decision, the Company filed a legal appeal on April 8, 2026, via letter No. 24/Misc/IV/26/NM. As of the date of issuance of these financial statements, there has been no further decision regarding the aforementioned legal action.

Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan pada tanggal 21 April 2025.

Other Matter

The Company's financial statements as of December 31, 2024, and for the year then ended, presented as comparative figures to the financial statements as of December 31, 2025, and for the year then ended, were audited by another independent auditor, who issued an unmodified opinion on the financial statements on April 21, 2025.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal controls as management determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company internal control.*

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kantor Akuntan Publik/
Registered Public Accountant
RAMA WENDRA

00074

Rahman Akbar, CPA
Izin Akuntan Publik No. AP. 1806/
Certified Public Accountant License No. AP 1806

23 April 2026/ *April 23, 2026*

These Financial Statements are Originally issued in Indonesian Language

PT INFO TEKNO SIAGA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INFO TEKNO SIAGA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF 31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	Catatan/ *Notes*	2024	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas di bank	63.173.200.609	2c,2d,2l,4,25	47.969.082.632	*Cash in bank*
Piutang usaha				*Trade receivables*
- Pihak ketiga	122.803.973.216	2d,5,25	77.237.121.561	*Third parties -*
Piutang lain-lain				*Other receivables*
- Pihak ketiga	170.538.040	2d, 2e, 6	125.541.352	*Third parties -*
Biaya dibayar dimuka	3.863.331.130	2f, 7	2.314.402.443	*Prepaid expenses*
Jumlah aset lancar	**190.011.042.995**		**127.646.147.988**	***Total current assets***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap - neto	5.139.411.218	2g,8	3.046.796.618	*Fixed assets - net*
Aset hak guna - neto	3.688.072.139	2h,9a	-	*Right of use assets - net*
Aset tak berwujud - neto	2.951.625.000	2j,10	4.919.375.000	*Intangible assets - net*
Aset pajak tangguhan	5.332.299.638	2m,13c	3.413.046.807	*Deferred tax assets*
Aset tidak lancar lainnya	1.228.809.225	11	642.877.375	*Other non-current assets*
Jumlah aset tidak lancar	**18.340.217.220**		**12.022.095.800**	***Total non-current assets***
JUMLAH ASET	**208.351.260.215**		**139.668.243.788**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS LANCAR				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha				*Trade payables*
- Pihak ketiga	39.757.569.758	2d, 2l,12a,25	56.103.808.045	*Third parties -*
- Pihak berelasi	3.492.483.696	2e,12a,23,25	1.692.742.899	*Related parties -*
Utang pajak	10.685.603.177	2m, 13a	13.239.563.460	*Taxes payables*
Beban akrual	65.801.145.406	14,25	5.139.055.885	*Accrued expenses*
Liabilitas sewa	1.844.018.059	2h,9b	-	*Lease liabilities*
Pendapatan ditangguhkan	1.967.750.000	2e,15,25	1.967.750.000	*Deferred revenue*
Jumlah liabilitas lancar	**123.548.570.096**		**78.142.920.289**	***Total current liabilities***
LIABILITAS TIDAK LANCAR				***NON CURRENT LIABILITIES***
Pendapatan ditangguhkan	983.875.000	2e,2j,15,25	2.951.625.000	*Deferred revenue*
Liabilitas imbalan pascakerja	738.284.000	22	1.502.569.000	*Post-employment benefit liabilities*
Liabilitas sewa	1.844.054.080	2h,9b	-	*Lease liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	**3.566.213.080**		**4.454.194.000**	***Total non-current liabilities***
JUMLAH LIABILITAS	**127.114.783.176**		**82.597.114.289**	***TOTAL LIABILITIES***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements

These Financial Statements are Originally issued in Indonesian Language

PT INFO TEKNO SIAGA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INFO TEKNO SIAGA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF 31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	Catatan/ *Notes*	2024	
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp100.000 per saham, modal dasar - 120.000 saham, modal ditempatkan dan di setor penuh - 80.000 saham	8.000.000.000	16	8.000.000.000	*Share capital - par value of Rp100.000 per share, authorized capital - 120.000 shares, issued and fully paid capital - 80.000 shares*
Saldo laba	73.213.137.599		48.994.427.919	*Retained earnings*
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja - neto	23.339.440		76.701.580	*Remeasurements of liability for employees benefits - net*
JUMLAH EKUITAS	**81.236.477.039**		**57.071.129.499**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**208.351.260.215**		**139.668.243.788**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Jakarta, 23 April 2026/ *Jakarta April 23, 2026*
Penanggungjawab/ *Responsible*

Achmad Indrawan
Direktur Utama/
President Director

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements

These Financial Statements are Originally issued in Indonesian Language

PT INFO TEKNO SIAGA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INFO TEKNO SIAGA
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	Catatan/ *Notes*	2024	
Pendapatan	1.070.263.321.112	2k,17	597.893.248.549	*Revenues*
Beban pokok pendapatan	(217.678.386.848)	2k,18	(110.939.990.377)	*Cost of revenues*
Laba bruto	**852.584.934.264**		**486.953.258.172**	***Gross profit***
Beban operasi				***Operating expenses***
Beban pemasaran	(515.212.859.613)	2k,19	(283.298.451.887)	*Marketing expenses*
Beban umum dan administrasi	(309.057.756.754)	2k,20	(167.786.272.444)	*General and administration expenses*
Pendapatan (beban) lain-lain	3.049.531.212	2k,21	2.551.810.972	*Other income (expenses)*
Jumlah beban operasi	**(821.221.085.155)**		**(448.532.913.359)**	***Total operating expenses***
Laba sebelum pajak penghasilan	**31.363.849.109**		**38.420.344.813**	***Profit before income taxes***
Beban pajak penghasilan	(7.145.139.429)	2m,13b	(8.537.478.862)	***Income tax expense***
Laba tahun berjalan	**24.218.709.680**		**29.882.865.951**	***Profit for the year***
Laba (rugi) komprehensif lain				***Other comprehensive income (loss)***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:				*Item not to be reclassified to profit and loss*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	(68.413.000)		66.616.000	*Remeasurement of employee benefits liabilities*
Efek pajak terkait	15.050.860		(14.655.520)	*Related tax effect*
Laba (rugi) komprehensif lain setelah pajak	(53.362.140)		51.960.480	***Other comprehensive income (loss) net of tax***
Jumlah laba komprehensif lain tahun berjalan	**24.165.347.540**		**29.934.826.431**	***Total other comprehensive profit for the year***

Jakarta, 23 April 2026/ *Jakarta April 23, 2026*
Penanggungjawab/ *Responsible*

Achmad Indrawan
Direktur Utama/
President Director

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements

PT INFO TEKNO SIAGA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INFO TEKNO SIAGA
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor Penuh/ *Issued and fully Paid Capital*	**Saldo laba/** *Retained earnings*	**Penghasilan komprehensif lain/** *Other comprehensive incomes*	**Jumlah ekuitas/** *Total equity*	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	**8.000.000.000**	**19.111.561.968**	**24.741.100**	**27.136.303.068**	***Balance as of December 31, 2023***
Laba tahun berjalan	-	29.882.865.951	-	29.882.865.951	*Profit for the year*
Pendapatan komprehensif lain	-	-	51.960.480	51.960.480	*Other comprehensive income*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	**8.000.000.000**	**48.994.427.919**	**76.701.580**	**57.071.129.499**	***Balance as of December 31, 2024***
Laba tahun berjalan	-	24.218.709.680	-	24.218.709.680	*Profit for the year*
Pendapatan komprehensif lain	-	-	(53.362.140)	(53.362.140)	*Other comprehensive income*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025	**8.000.000.000**	**73.213.137.599**	**23.339.440**	**81.236.477.039**	***Balance as of December 31, 2024***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements
which are an integral part of the financial statements.

PT INFO TEKNO SIAGA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INFO TEKNO SIAGA
STATEMENT OF CASH FLOW
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			***Cash flows from operating activities***
Penerimaan dari pelanggan	1.024.696.469.457	520.656.126.988	*Receipt from customers*
Pembayaran kepada pemasok, operasi dan karyawan	(992.868.300.731)	(539.712.581.300)	*Payments to suppliers, operations and employees*
Pembayaran pajak penghasilan	(13.945.504.299)	(9.314.344.395)	*Payments for income taxes*
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	**17.882.664.427**	**(28.370.798.707)**	***Net cash flows provided by (used in) operating activities***
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			***Cash Flows from Investing Activities***
Perolehan aset tetap	(2.092.614.600)	(2.823.728.844)	*Acquisition of fixed assets*
Perolehan aset tidak lancar lainnya	(585.931.850)	(105.300.475)	*Acquisition of other non-current assets*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	**(2.678.546.450)**	**(2.929.029.319)**	***Net cash flows used in investing activities***
Kenaikan (penurunan) bersih kas di bank	15.204.117.977	(31.299.828.026)	*Net increase (decrease) cash in banks*
Kas di bank pada awal tahun	**47.969.082.632**	**79.268.910.658**	***Cash in banks at the beginning the year***
Kas di bank pada akhir tahun	**63.173.200.609**	**47.969.082.632**	***Cash in banks at the end of the year***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian Entitas

PT Info Tekno Siaga (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta No. 15 yang dibuat dihadapan Citra Buana Tungga, S.H., M.KN., notaris di Tangerang pada tanggal 29 Juni 2018 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor AHU-0030563.AH.01.01 Tahun 2018. Kemudian telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir dengan Akta No. 3 tanggal 8 Mei 2020 dari Yudie Reza Haryansyah S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan di setor menjadi 80.000 lembar. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan no. AHU.AH.01.03-0222682 tertanggal 18 Mei 2020.

Akta mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, berdasarkan perubahan terakhir yaitu Akta No. 3 tanggal 8 Mei 2020 dengan nomor AHU-AH.01.03-0366522, modal dasar 120.000 (seratus dua puluh ribu) lembar saham, saham yang dikeluarkan dan disetor penuh oleh pemegang saham yaitu 80.000 (delapan puluh ribu) lembar saham, masing- masing saham bernilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).

Akta mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, berdasarkan perubahan terakhir yaitu Akta No. 6 tanggal 14 Juni 2022 dengan nomor AHU-0040266.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 14 Juni 2022. Modal dasar 600.000 (enam ratus ribu) lembar saham, saham yang dikeluarkan dan disetor penuh oleh pemegang saham yaitu 150.000 (seratus lima puluh) lembar saham, masing-masing saham bernilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Pada tanggal 10 Agustus 2023, Perusahaan melakukan perubahan kembali terhadap Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar tersebut diaktakan oleh Notaris Yudie Reza Haryansyah, SH, M.Kn dengan akta notaris nomor 05 tanggal 10 Agustus 2023. Perubahan Anggaran Dasar itu telah mendapatkan persetujuan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0060080.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 04 Oktober 2023. Perubahan Anggaran Dasar tahun 2023 terkait perubahan modal dasar Perusahaan yang semula sebesar 600.000 (enam ratus ribu) lembar saham menjadi sebesar 120.000 (seratus dua puluh) lembar saham dan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).

Perusahaan berdomisili di Jakarta, dan terdaftar berdomisili Capital Place Building Lantai 47, Suite B, Jalan Jenderal Gatot Subroto - kav.18, kota administrasi Jakarta Pusat.

Perusahaan telah mendapatkan izin usaha sebagai perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan nomor KEP-48/D.05/2021 tertanggal 2 Juni 2021.

b. Kegiatan Usaha

Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa, yang meliputi jasa kecuali dalam bidang hukum dan pajak dan meliputi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang berhubungan dengan piranti lunak, serta merupakan jasa *E-Commerce* , meliputi kegiatan transaksi perdagangan barang dan atau jasa melalui media jaringan elektronika, internet atau media elektonik lainnya.

Perusahaan telah beroperasi secara komersial sejak Januari 2020.

c. Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Komisaris			***Commissioner***
Komisaris	Nova Novianti	Nova Novianti	*Commissioner*

1. GENERAL

a. The Entity Establishment

PT Info Tekno Siaga (the Company) was established based on Deed No. 15 which was made before Citra Buana Tungga, SH, M.KN., notary in Tangerang on June 29, 2018 and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree number AHU- 0030563.AH.01.01 of 2018. Then there have been changes several times, most recently by Deed No. 3 dated 8 May 2020 from Yudie Reza Haryansyah S.H., M.Kn., Notary in Bekasi, regarding an increase in issued and paid-up capital to 80,000 shares. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree no. AHU.AH.01.03-0222682 dated 18 May 2020.

Deed regarding changes to The Company's articles of association has been amended several times, based on the latest amendment namely Deed No. 3 dated May 8, 2020 under number AHU-AH,01,03-0366522, authorized capital of 120,000 (one hundred twenty thousand) shares, the shares issued and fully paid by the shareholders are 80,000 (eighty thousand) shares, each share having a value of Rp 100,000 (one hundred thousand rupiahs) with a nominal value a total of Rp 8,000,000,000 (eight billion rupiah).

Deed regarding changes to The Company's articles of association has been amended several times, based on the latest amendment namely Deed No. 6 dated June 14, 2022 under number AHU-0040266.AH.01.02 year 2022, authorized capital of 600,000 (six houndred thousand) shares, the shares issued and fully paid by the shareholders are 150,000 (one hundred and fifty) shares, each share having a value of Rp 100,000 (one hundred thousand rupiahs) with a nominal value a total of Rp 15,000,000,000 (fifteen billion rupiah).

On August 10 2023, the Company made further changes to its Articles of Association. The amendment to the Articles of Association was notarized by Notary Yudie Reza Haryansyah, SH, M.Kn with notarial deed number 05 dated 10 August 2023. The amendment to the Articles of Association has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia number AHU-0060080.AH.01.02 .Year 2023 dated 04 October 2023. Amendments to the 2023 Articles of Association relating to changes to the Company's authorized capital from 600,000 (six hundred thousand) shares to 120,000 (one hundred and twenty) shares and fully paid capital amounting to Rp8,000,000,000 (eight billion rupiah).

The Company is domiciled in Jakarta, with registered domiciled Capital Place Building Lantai 47, Suite B, Jalan Jenderal Gatot Subroto - kav.18, center of Jakarta.

The company has obtained a business license as a company providing information technology-based lending and borrowing services with the number KEP-48/D.05/2021 dated June 2, 2021.

b. Business Activities

The Company carries out business activities in the field of services, which include services except in the field of law and tax and includes information technology-based loan and loan services related to software, as well as an E-Commerce service, covering trading activities of goods and or services through network media electronics, internet or other electronic media.

The Company operated commercially since January 2020.

c. Board of Commissioners and Directors

As of December 31, 2025 and 2024 the composition of The Company's Board of Commissioner and Directors is as follow:

1. UMUM (Lanjutan)

c. Dewan Komisaris dan Direksi (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

Direksi	
Direktur Utama	Achmad Indrawan
Direktur	Minerva Agustiani

Jumlah karyawan Perusahaan sebanyak 219 dan 181 karyawan masing-masing pada tahun 2025 dan 2024.

Pada tahun 2025 dan 2024 Perusahaan membayar untuk gaji direktur dan honor komisaris masing-masing sebesar Rp1.655.840.000 dan Rp1.020.000.000.

d. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan yang diwakili oleh Achmad Indrawan sebagai Direktur bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan dan disetujui untuk terbit pada tanggal 23 April 2026.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 10 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan pada saat terjadinya *(accrual basis)* dengan konsep biaya perolehan *(historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Mata uang pelaporan dan fungsional yang digunakan dalam pelaporan keuangan adalah Rupiah.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Entitas. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

c. Kas di Bank

Kas di bank merepresentasikan alat pembayaran yang tersedia dan memenuhi syarat untuk membiayai usaha Perusahaan dan tidak dibatasi penggunaannya atau tidak dijadikan jaminan.

1. GENERAL (Continued)

c. Board of Commissioners and Directors (Continued)

As of December 31, 2025 and 2024 the composition of The Company's Board of Commissioner and Directors is as follow: (Continued)

Director	
Achmad Indrawan	*President Director*
Minerva Agustiani	*Director*

The company had total number of employee amounting to 219 in 2025 and 181 in 2024 respectively.

In 2025 and 2024, the Company pays for the director's salary and commissioner's fee amounting to IDR1,655,840,000 and IDR1,020,000,000 respectively.

d. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS

The Company management appointed by Achmad Indrawan as Director responsible for the preparation and presentation of financial reports which have been completed and approved for publication on April 23, 2026.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

Management is responsible for the preparation and presentation of financial statements. The financial statements have been prepared by Indonesian Financial Accounting Standards, which include Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants and Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 10 relating to information technology-based joint funding services.

b. Basis of Preparation of Financial Statements

The financial statements except for the statements of cash flows, have been prepared on the accrual basis using historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The reporting and functional currency used in the financial statements is Indonesian Rupiah.

The preparation of financial statements in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia requires the use of estimates and assumptions. It also requires management to make judgments in the process of applying the Entity accounting policies. Areas of complex or require a higher degree of judgment or areas where assumptions and estimates could have a significant impact on the financial statements disclosed in Note 3.

c. Cash in Banks

Cash in banks represent payment instruments that are available and meet the requirements to finance the Company's business and are not restricted in use or are not used as collateral.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Kebijakan berlaku sejak 1 Januari 2020

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian atau penjualan asset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar. Setelah pengakuan awal, seluruh aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar, tergantung dari klasifikasi aset keuangan tersebut.

Klasifikasi asset keuangan

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang memenuhi kondisi berikut diukur selanjutnya pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI):

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dari aset keuangan dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan lainnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Entitas dapat menetapkan pilihan yang takterbatalkan pada saat pengakuan awal aset keuangan:

- Entitas dapat menetapkan pilihan yang tak terbatalkan untuk menyajikan dalam penghasilan komprehensif lain perubahan selanjutnya pada nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas jika persyaratan tertentu telah dipenuhi; dan
- Entitas dapat menetapkan pilihan yang tak terbatalkan untuk mengukur investasi pada instrumen utang yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI pada nilai wajar melalui laba rugi jika penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signfikan mengurangi inkonsistensi pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*).

Biaya perolehan diamortisasi dan metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya), diluar kerugian kredit ekspektasian, selama perkiraan umur aset keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Biaya perolehan diamortisasi aset keuangan adalah jumlah pengukuran awal aset keuangan dikurangi dengan jumlah pembayaran kembali, ditambah dengan akumulasi amortisasi atas perbedaan antara jumlah pengakuan awal dan jumlah pada saat jatuh tempo dengan menggunakan metode suku bunga efektif, disesuaikan dengan penyisihan. Jumlah biaya perolehan diamortisasi bruto dari suatu aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi sebelum disesuaikan dengan penyisihan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Instruments

Financial Assets

Policy applicable from January 1,2020

All financial assets are recognized and derecognized on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the timeframe established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value. All financial assets are measured subsequently in their entirety at either amortized cost or fair value, depending on the classification of the financial assets

Classification of financial assets

Financial assets that meet the following conditions are measured subsequently at amortized cost:

- *The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

Financial assets that meet the following conditions are measured subsequently at fair value through other comprehensive income (FVTOCI):

- *The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial assets; and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

By default, all other financial assets are measured subsequently at fair value through profit or loss (FVTPL).

The entity may make the following irrevocable election/designation at initial recognition of a financial asset:

- *The entity may irrevocably elect to present subsequent changes in fair value of an equity investment in other comprehensive income if certain criteria are met; and*
- *The entity may irrevocably designate an investment in debt instrument that meets the amortized cost or FVTOCI criteria as measured at FVTPL if doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch.*

Amortized cost and effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) excluding expected credit losses, through the expected life of the debt instrument, or, where appropriate, a shorter period, to the gross carrying amount of the debt instrument on initial recognition.

The amortized cost of a financial asset is the amount at which the financial asset is measured at initial recognition minus the principal repayments, plus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for any loss allowance. The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any loss allowance.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Aset keuangan dalam kelompok FVTPL

Aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI diukur pada FVTPL. Terutama:

- Investasi dalam instrumen ekuitas diklasifikasi sebagai FVTPL, kecuali jika Entitas menetapkan bahwa investasi yang bukan merupakan instrumen ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan maupun imbalan kontinjen yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis sebagai FVTOCI pada saat pengakuan awal.

- Aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI diukur pada FVTPL. Sebagai tambahan, investasi pada instrumen utang yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signfikan mengurangi inkonsistensi pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang timbul karena mengukur aset dan liabilitas atau mengakui keuntungan dan kerugiannya dengan dasar yang berbeda.

Aset keuangan FVTPL diukur pada nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, dan keuntungan atau kerugian nilai wajar diakui pada laba rugi sepanjang mereka bukan merupakan bagian dari lindung nilai (lihat kebijakan akuntansi untuk lindung nilai).

Penurunan nilai aset keuangan

Entitas mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada investasi aset keuangan yang diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI. Jumlah kerugian kredit ekspektasian diperbaharui pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal atas instrumen keuangan yang bersangkutan.

Entitas selalu mengakui kerugian kredit ekspektasian (ECL) sepanjang umurnya atas piutang usaha dan aset kontrak. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan ini diestimasi berdasarkan pengalaman historis Entitas, disesuaikan dengan faktor-faktor yang spesifik terhadap debitur, kondisi ekonomi umum dan penilaian kondisi saat ini serta kondisi yang diperkirakan pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu uang jika relevan.

Untuk instrumen keuangan lainnya, Entitas mengakui ECL sepanjang umurnya apabila terdapat peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal. Tetapi jika risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Entitas mengukur penyisihan kerugian atas instrumen keuangan tersebut dengan menggunakan ECL 12 bulan.

ECL sepanjang umur mencerminkan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari seluruh kemungkinan gagal bayar selama umur instrumen keuangan. Sebaliknya, ECL 12 bulan mencerminkan sebagian dari ECL sepanjang umur yang diperkirakan akan timbul karena peristiwa gagal bayar selama periode 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Dalam melakukan penilaian apakah risiko kredit atas suatu instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Entitas membandingkan risiko gagal bayar instrumen keuangan yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal. Dalam penilaian ini, Entitas mempertimbangkan informasi kuantitatif dan kualitatif yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan, termasuk pengalaman historis dan informasi perkiraan masa depan (*forward looking*).

Entitas menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pelanggan tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Perusahaan secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Perusahaan terekspos terhadap risiko kredit.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Instruments (Continued)

Financial assets at FVTPL

Financial assets that do not meet the criteria for being measured at amortized cost or FVTOCI are measured at FVTPL. Specifically:

- *Investments in equity instruments are classified as at FVTPL, unless the entity designates an equity investment that is neither held for trading nor a contingent consideration arising from a business combination as at FVTOCI on initial recognition.*

- *Financial assets that do not meet the amortized cost criteria or the FVTOCI criteria are classified as at FVTPL. In addition, investments in debt instrument that meet either the amortized cost criteria or the FVTOCI criteria may be designated as at FVTPL upon initial recognition if such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (so called 'accounting mismatch') that would arise from measuring assets or liabilities or recognizing the gains and losses on them on different bases.*

Financial assets at FVTPL are measured at fair value at the end of each reporting period, with any fair value gains or losses recognized in profit or loss to the extent they are not part of a designated hedging relationship (see hedge accounting policy).

Impairment of financial assets

The entity recognizes a loss allowance for expected credit losses on investments in financial assets that are measured at amortized cost or at FVTOCI. The amount of expected credit losses is updated at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial recognition of the respective financial instrument.

The entity always recognizes lifetime expected credit losses (ECL) for trade accounts receivables and contract assets. The expected credit losses on these financial assets are estimated based on the entity's historical credit loss experience, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions and an assessment of both the current as well as the forecast direction of conditions at the reporting date, including time value of money where appropriate.

For all other financial instruments, the entity recognizes lifetime ECL when there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. However, if the credit risk on the financial instrument has not increased significantly since initial recognition, the entity measures the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month ECL.

Lifetime ECL represents the expected credit losses that will result from all possible default events over the expected life of a financial instrument. In contrast, 12-month ECL represents the portion of lifetime ECL that is expected to result from default events on a financial instrument that are possible within 12 months after the reporting date.

In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the entity compares the risk of a default occurring on the financial instrument at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument at the date of initial recognition. In making this assessment, the entity considers both quantitative and qualitative information that is reasonable and supportable, including historical experience and forward-looking information that is available without undue cost or effort.

Group considers financial asset to be in default when the customers is unlikely to pay its credit obligations to The Company in full. The maximum period considered when estimating ECL is the maximum contractual period over which The Company is exposed to credit risk.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Penghentian pengakuan aset keuangan

Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Entitas mentransfer aset keuangan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Entitas tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Entitas mengakui keterlibatan yang berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Entitas memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Entitas masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Pada penghentian asset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, selisih antara nilai tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima diakui dalam laba rugi. Sebagai tambahan, pada penghentian pengakuan investasi pada asset keuangan dalam kelompok FVTOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi. Sebaliknya, pada penghentian pengakuan investasi pada instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai FVTOCI oleh Entitas pada pengakuan awal, keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas tidak diakui dalam laba rugi, melainkan dipindahkan ke saldo laba.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Entitas diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Entitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL pada saat liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan atau atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Liabilitas keuangan selain liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola Entitas secara bersama dan mempunyai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.
- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Instruments (Continued)

Derecognition of financial assets

The entity derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the entity neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the entity recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the entity retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the entity continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss. In addition, on derecognition of an investment in a debt instrument classified as at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the other comprehensive income is reclassified to profit or loss. In contrast, on derecognition of an investment in equity instrument which the entity has elected on initial recognition to measure at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the other comprehensive income is not reclassified to profit or loss, but is transferred to retained earnings.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments issued by the entity are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the entity are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial liabilities

Financial liabilities are classified as either at FVTPL or at amortized cost.

Financial liabilities at fair value through profit or loss (FVTPL)

Financial liabilities are classified as at FVTPL when the financial liability is either held for trading or it is designated as at FVTPL.

A financial liability other than a financial liability held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:

- *it has been acquired principally for the purpose of repurchasing in the near term; or*
- *on initial recognition it is part of a portfolio of identified financial instruments that the entity manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or*
- *it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.*
- *such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) (Lanjutan)

Liabilitas keuangan selain liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika: (Lanjutan)

- kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi), misalnya Direksi dan CEO.

Liabilitas keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup setiap bunga yang dibayar dari liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi utang usaha, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, utang pembelian kendaraan, liabilitas sewa pembiayaan, utang bank dan jaminan penyalur, pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium atau diskonto lainnya) selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Entitas menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Entitas telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Estimasi nilai wajar

Entitas menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang dapat diobservasi.

Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan secara saling hapus dan nilai bersihnya disajikan di dalam laporan posisi keuangan jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan ada niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Entitas melakukan transaksi dengan pihak- pihak berelasi seperti yang dinyatakan dalam PSAK 224 (Penyesuaian 2024), mengenai “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Instruments (Continued)

Financial liabilities at fair value through profit or loss (FVTPL) (Continued)

A financial liability other than a financial liability held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition if: (Continued)

- *a group of financial assets, financial liabilities or both is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the entity is provided internally on that basis to the entity’s key management personnel (as defined in PSAK 7: Related Party Disclosures), for example the entity’s Board of Directors and Chief Executive Officer.*

Financial liabilities at FVTPL are stated at fair value, with any resultant gain or loss recognized in profit or loss. The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any interest paid on the financial liability.

Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities which include trade accounts payable, other accounts payable, accrued expenses, liabilities for purchases of vehicles, finance lease obligations, bank loans and distributors’ deposits, are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, with interest expense recognized on an effective yield basis.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial liability on initial recognition.

Derecognition of financial liabilities

The entity derecognizes financial liabilities when, and only when, the entity’s obligations are discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

Estimated fair value

The Entity uses multiple valuation techniques commonly used to determine the fair value of financial instruments with a low level of complexity. Inputs used in valuation techniques for financial instruments above are observable market data.

Offsetting financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and presented at net amount presented in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is the intention to settle on a net basis, or realize the asset and settle the liability simultaneously.

e. Transactions with Related Parties

The Entity has transactions with related parties as stated in PSAK 224 (Improvement 2024), regarding "Related Party Disclosures".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (Lanjutan)

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   1) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   2) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor;
   3) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   1) entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk berikutnya terkait dengan entitas lain).
   2) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   3) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   4) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   5) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
   6) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
   7) entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepda entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

f. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method).

g. Aset Tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Biaya perolehan aset terdiri dari harga pembelian dan biaya lainnya yang dapat distribusikan secara langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang siap untuk digunakan.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun ganda berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun / Year	
Inventaris kantor	4 Tahun	*Office equipment*
Renovasi Ruko sewa	2 Tahun	*Leasehold improvements*

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan dikaji setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Transactions with Related Parties (Continued)

A related party is a person or entity related to the reporting entity:

a A person or family member of that person's relationship to the reporting entity if that person:
   1) has control or joint control over the reporting entity;
   2) has significant influence over the reporting entity; or
   3) the key management personnel of the reporting entity or the parent of the reporting entity.

b An entity is related to a reporting entity if any of the following:
   1) the reporting entity are members of the same group (which means a parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
   2) the entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group, which the other entity is a member).
   3) both entities are joint ventures of the same third party.
   4) the entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
   5) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
   6) the person identified in subparagraph (a) (i) has significant influence over the entity or key management personnel of the entity (or a parent of the entity).
   7) the entity, or many member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

All balances and significant transactions with related parties, whether done by the normal terms and conditions, as was done by third parties, are disclosed in the notes to the financial statements.

f. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over the useful life of each expense using the straight-line method.

g. Fixed Assets

Property and equipment are stated at cost, less accumulated depreciation. The cost of property and equipments comprises its purchase price and any directly attributable cost of bringing the asset to its working condition and location for its intended use.

Depreciation is computed using the double declining method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changesin estimate accounted for on a prospective basis.

Land is stated at cost and not depreciated.

The cost of maintenance and repairs is charged to statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, orservice an item of fixed asset, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

g. Aset Tetap (Lanjutan)

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun yang bersangkutan.

Aset tetap yang dihentikan pengakuannya atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian yang timbul dibukukan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

h. Aset Hak Guna

Sebelum 1 Januari 2020

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Perusahaan sebagai penyewa

Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Perusahaan yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan di dalam laporan posisi keuangan sebagai utang sewa.

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus *(straight-line basis)* selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sewa kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

Dari 1 Januari 2020

Perusahaan sebagai penyewa

Perusahaan menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal insepsi kontrak. Perusahaan mengakui aset hak- guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perusahaan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

a. Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangai insentif sewa;
b. pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
c. Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

g. Fixed Assets (Continued)

When assets are retired or otherwise disposed of their carrying values and the related accumulated depreciation and any impairment loss are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in the statements of comprehensive income for the respective year.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

h. Right of Use Assets

Before January 1, 2020

A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the asset. Other leases, which do not meet these criteria, classified as an operating lease.

The Company as a lease

Assets under finance leases are recorded at the beginning of the lease term at the fair value of The Company's leased assets determined at the start of the contract or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Liabilities to lessors are presented in the statement of financial as lease payable.

Assets under finance leases are depreciated based on the estimated useful lives of the same as owned assets or are depreciated over the shorter period between the lease period and the life the benefits.

Lease payments must be separated between the portion that is the finance expense and the deduction of the lease liability so as to achieve a constant (fixed) interest rate on the balance of the liability. Contingent rents are charged in the period in which they are incurred.

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, unless there is another systematic basis that more closely reflects the time pattern in which the benefits of the assets enjoyed by the users. Contingent rents are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

If an incentive is obtained under an operating lease, the incentive is recognized as a liability. The overall benefit from the incentives is recognized as a deduction from the rental costs on a straight-line basis unless otherwise available another systematic basis that better reflects the timing pattern of the benefits enjoyed by the user.

From January 1, 2020

The Company as a lease

The Company assesses whether a contract contains a lease, at the inception date of the contract. The Company recognizes lease assets and related lease liabilities in respect of all lease arrangements in which The Company is the lessee, except for short term leases (which are defined as leases that have lease terms of 12 months or less) and leases where the underlying asset is low value. For these leases, The Company recognizes lease payments as operating expenses on a straight-line basis over the lease term unless other systematic basis more represents the pattern of consumption of the lessee's benefits from the leased assets.

Lease liabilities are initially measured at the present value of future lease payments that have not been paid at the inception date, discounted at the interest rate implicit in the lease. If this interest rate cannot be determined, The Company uses an incremental lending rate.

Lease payments that are calculated in the measurement of lease liabilities consist of:

a. *fixed payments (including substantially fixed payments), less rental incentives;*
b. *variable lease payments that depend on the index or interest rate that was originally measured by using the index or interest rate on the commencement date;*
c. *the amount expected to be paid by the lessee in the residual value guarantee;*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

h. Aset Hak Guna (Lanjutan)

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas: (Lanjutan)

d. harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
e. pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk mereflesikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Perusahaan mengukur kembali liabilitas sewa dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna jika:

a. terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

b. terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan).

c. kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Perusahaan tidak melakukan penyesuaian tersebut selama periode yang disajikan.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak- guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Perusahaan dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 237. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Aset hak-guna disajikan sebagai pos terpisah di laporan posisi keuangan.

Perusahaan menerapkan PSAK 236 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga tidak diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak-guna. Pembayaran terkait diakui sebagai beban dalam periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi dan dicatat dalam pos Beban lain-lain dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Sebagai cara praktis, SAK 16 mengijinkan penyewa untuk memisahkan komponen nonsewa, dan mencatat masing-masing komponen sewa dan komponen nonsewa sebagai kesepakatan sewa tunggal. Perusahaan tidak menggunakan cara praktis ini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

h. Right of Use Assets (Continued)

Lease payments that are calculated in the measurement of lease liabilities consist of: (Continued)

d. *the call option exercise price if the lessee is certain to exercise the option; and*
e. *payment of penalty due to termination of the lease, if the lease term reflects the lessee exercising the option to terminate the lease.*

Lease obligations are presented as a separate item in the statement of financial position.

Lease liabilities are subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount for reflects the rent that has been paid.

The Company remeasures the lease liability and makes the related adjustments to the leased assets if:

a. there is a change in the lease term or a change in the valuation on the exercise of the purchase option, where the lease liability is measured by discounting the revised lease payments using the revised discount rate.

b. there are changes in future leases as a result of changes in index or changes in estimates the payment is based on the residual value of the guarantee at which the lease liability is remeasured by discount revised lease payments using the initial discount rate (unless payment is made the lease changes due to changes in the floating interest rate, where the revised discount rate is used).

c. A modified lease contract and a modified lease are not recorded as separate leases, where the lease is liable measured by discounting the revised lease payments using the revised discount rate.

The Company did not make these adjustments during the period presented.

Useful assets consist of initial measurement of lease liabilities, lease payments made on or before the inception of the lease and initial direct costs. Utilization assets are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

If the Company is incurred a liability for the costs of dismantling and transferring the leased asset, restoring the place where the asset is located or restoring the underlying asset to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured in accordance with PSAK 237 related, unless those costs are incurred to produce inventories.

The use of rights assets is depreciated over the shorter period between the lease term and the useful life of the underlying asset. If the lease transfers ownership of the underlying asset or if the cost of acquisition of the underlying asset means that The Company will exercise the call option, the use rights asset is depreciated over the useful life of the underlying asset. Depreciation starts on the inception date of the lease.

Right of use assets are presented as a separate item in the statement of financial position.

The Company applies PSAK 236 to determine whether the use of rights assets is impaired and to record an identifiable impairment loss as described in the asset policy impairment.

Variable leases that do not depend on an index or interest rate are not taken into accounts in the measurement of lease liabilities and lease assets. The related payment is recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggered the payment occurred and is recorded under 'Other expenses' in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

As a practical matter, SAK 16 allows lessees to separate the non-lease component, and records each component of the lease and the non-lease component as a single lease agreement. The Company does not use this practical method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

i. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Entitas menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Entitas membuat estimasi jumlah terpulihkan atas aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, model penilaian yang sesuai digunakan untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda (*valuation multiplies*) atau indikator nilai wajar lain yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

j. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administrasi.

Aset tak berwujud antara lain berupa lisensi atas penggunaan perangkat lunak yang berasal dari hibah.

Umur manfaat aset tak berwujud dinilai terbatas. Aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dan menguji penurunan nilai apabila terdapat indikasi aset tak berwujud mengalami penurunan nilai.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset tak berwujud dengan umur manfaat yang terbatas ditinjau setidaknya pada setiap akhir periode pelaporan. Perubahan pada perkiraan umur manfaat atau perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomi terjadi pada aset tersebut dicatat dengan mengubah periode amortisasi atau metode, yang sesuai, dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas diakui dalam laporan laba rugi dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset tak berwujud.

Aset tak berwujud yang dimiliki adalah perangkat lunak yang diamortisasi secara garis lurus selama masa manfaatnya yaitu 4 tahun.

Suatu aset tak berwujud dihentikan pengakuannya saat pelepasan, atau ketika tidak terdapat ekspektasi manfaat ekonomi masa depan dari penggunaan atau pelepasan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tak berwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laporan laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari kontrak pelanggan

SAK 15 menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan, dan berapa banyak pendapatan yang harus diakui. Standar ini menyediakan model lima langkah tunggal untuk penentuan dan pengakuan pendapatan untuk diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

i. Impairment of Non-Financial Assets

The Entity assesses at each reporting date whether there is an indication that assets may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for assets is required, the Entity made an estimate of the recoverable amounts of the respective assets.

The recoverable amount determined for an individual asset is the higher of the fair value of the asset or UPK less the cost of selling with its value, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of assets or other asset groups. If the carrying value of an asset is greater than its recoverable value, the asset is considered to be impaired and the carrying value of the asset is reduced in value to its recoverable value.

In calculating the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that describes the current market valuation of the time value of money and the specific risks to the asset. In determining fair value less costs to sell, the last market bid price is used, if available. If there is no transaction, the appropriate valuation model is used to determine the fair value of the asset. These calculations are corroborated by valuation multiplies or other available fair value indicators.

Impairment losses from continuing operations, if any, are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income in accordance with the cost category that is consistent with the function of the impaired asset.

j. Intangibles Asset

Intangible assets are non-monetary assets that can be identified and do not have physical form, and are held for use in producing or delivering goods or services, rented to other parties, or for administrative purposes.

Intangible assets include, among other things, licenses for the use of software originating from grants.

The useful lives of intangible assets are assessed as finite. Intangible assets with finite lives are amortized over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired.

The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life is reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset is accounted for by changing the amortization period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortization expense on intangible assets with finite lives is recognized in profit or loss in the expense category consistent with the function of the intangible assets.

The intangible assets owned are software which are amortized straight line over their useful life, namely 4 years.

An intangible asset is derecognized on disposal, or when no future economic benefits are expected from use or disposal. Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in profit or loss when the asset is derecognized.

k. Revenue and Expense Recognition

Revenue from customer contracts

SAK 15 establishes a comprehensive framework for determining how, when and how much income should be recognized. This standard provides a single five-step model for revenue determination and recognition to be applied to all contracts with customers.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Pendapatan dari kontrak pelanggan (Lanjutan)

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke Perusahaan dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal.

Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau piutang.

Pendapatan komisi dihitung dari jumlah selisih bunga yang dikenakan kepada penerima dana dengan jumlah yang wajib dikembalikan kepada pemberi dana.

Beban diakui pada saat terjadinya.

l. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang di tetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang terjadi diakui laba rugi tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
US$, Dolar Amerika Serikat	16.782	16.162	*US$, United States Dollar*

Hasil dan posisi keuangan dari Perushaan yang memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang pelaporan dijabarkan pada mata uang pelaporan sebagai berikut:

- aset dan liabilitas dari setiap laporan posisi keuangan yang disajikan, dijabarkan pada kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan;
- penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dijabarkan menggunakan kurs rata-rata; dan
- seluruh selisih kurs yang timbul diakui dalam komponen ekuitas yang terpisah.

m. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui diluar laba atau rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung pada ekuitas.

Pajak Kini

Beban pajak kini dihitung menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Grup mengajukan keberatan, Grup mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Perusahaan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

k. Revenue and Expense Recognition (Continued)

Revenue from customer contracts (Continued)

Revenue is recognized whe it is probable the economic benefits will flow to The Company and the revenue can be measured reliably.

Revenue is measured at fair value of the consideration received or receivable.

Commission income is calculated based on the difference between the interest charged to fund recipients and the amount payable to fund

Expensed are recognized as incurred.

l. Transactions and Balances in Foreign Currency

Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rates prevailing at the transaction date. At statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using middle rates of exchanges quoted by Bank Indonesia at such dates. Exchange gains or losses arising on foreign currency transactions are recognized in the current period of profit or loss.

As of December 31, 2025 and 2024, the exchange rates used are as follows:

The results and financial position of the Company that have a functional currency that is different from the reporting currency are translated into the reporting currency as follows:

- *assets and liabilities for each statement of financial position presented are translated at the closing rate at the date of that statement of financial position;*
- *income and expenses for each statement of income are translated at average exchange rates; and*
- *all resulting exchange differences are recognized as a separate component of equity.*

m. Income Taxes

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized outside profit or loss, either in other comprehensive income or directly in equity.

Current Tax

Current tax expense is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at end of the reporting period, and is provided based on the estimated taxable income for the year. Management periodically evaluates positions taken in Annual Tax Returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Underpayment or overpayment of corporate income tax are presented as part of current tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received. If the Group files an appeal, the Group considers whether it is probable that a taxation authority will accept the appeal and reflect its effect on the Company's tax obligations.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

m. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Pajak Tangguhan (Lanjutan)

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

m. Income Taxes (Continued)

Deferred Tax (Continued)

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences with certain exceptions.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and the carry forward benefit of any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized and reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward benefit of unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (or tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if and only if, a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas.

Pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan.

a. Penyisihan Penurunan Nilai Piutang

Pos-pos signifikan yang terkait dengan estimasi dan asumsi antara lain:

Entitas mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pemberi kerja tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Entitas mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pemberi kerja dan status kredit dari pemberi kerja dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang guna mengurangi jumlah piutang pada jumlah yang diharapkan dapat diterima.

Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan untuk penurunan nilai piutang usaha.

b. Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 2 sampai dengan 4 tahun. Umur masa manfaat ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Entitas menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

c. Pajak Penghasilan

Entitas beroperasi di bawah peraturan perpajakan di Indonesia. Pertimbangan yang signifikan diperlukan untuk menentukan provisi pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Apabila keputusan final atas pajak tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut akan dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode dimana hasil tersebut dikeluarkan.

3. USE OF SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities.

Disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.

a. Allowance for Impairment of Receivables

Significant items related to estimates and assumptions include:

The Entity evaluated specific accounts where they have information that certain owners are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Entity use judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the owner and the owner's current credit status and known market factors, to record specific provisions against amounts due to reduce its receivable amounts that expects to collect.

These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of trade receivable.

b. Depreciation of Fixed Assets

The cost of acquisition of fixed assets depreciated using the double declining method. Management estimates the useful lives of the assets ranging from 2 to 4 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Entity conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

c. Income Tax

The Entity operates under the taxation laws of Indonesia. Significant consideration is needed for determining the provision for income tax and Value Added Tax. If the final decision on the tax differs from the amount initially recorded, such differences will be recorded in the statements of profit or loss and other comprehensive income in the period in which the results are issued.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Imbalan Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan asumsi aktuaria. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas aset program dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan kerja.

Asumsi tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program ditentukan secara seragam, dengan mempertimbangkan pengembalian historis jangka panjang, alokasi aset dan perkiraan masa depan atas pengembalian investasi jangka panjang. Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

3. USE OF SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

d. Employee Benefits

The present value of the employee benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost for pensions include the expected long-term rate of return on the relevant plan assets and the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefits obligation.

The expected return on plan assets assumption is determined on a uniform basis, taking into consideration long-term historical returns, asset allocation and future estimates of long-term-investment returns. Other key assumptions for employee benefits obligation are based in part on current market conditions.

4. KAS DI BANK

4. CASH IN BANK

	2025	2024	
Kas di Bank:			***Cash in Banks:***
Rupiah:			*Rupiah:*
PT Bank Central Asia Tbk	15.091.274.715	37.550.585.362	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Neo Commerce Tbk	414.932.552	2.389.442.791	*PT Bank Neo Commerce Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	173.315.939	172.135.141	*PT Bank Rakyat Indonesia Tbk*
PT Bank DBS Indonesia	162.995.301	26.005.289	*PT Bank DBS Indonesia*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	146.639.234	2.385.351	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia Tbk	91.274.747	28.153.726	*PT Bank Negara Indonesia Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	3.675.000	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
Sub jumlah	**16.084.107.488**	**40.168.707.660**	***Sub total***
Dolar Amerika Serikat:			*US Dollar:*
PT Bank Central Asia Tbk	52.718.639	267.166.587	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia Tbk	36.374.482	33.208.385	*PT Bank Negara Indonesia Tbk*
Sub jumlah	**89.093.121**	**300.374.972**	***Sub total***
Deposito Berjangka			***Time Deposits***
Rupiah:			*Rupiah:*
PT Bank DBS Indonesia	10.000.000.000	7.500.000.000	*PT Bank DBS Indonesia*
PT Bank Negara Indonesia Tbk	37.000.000.000	-	*PT Bank Negara Indonesia Tbk*
Sub jumlah	47.000.000.000	7.500.000.000	***Sub total***
Jumlah kas di bank	**63.173.200.609**	**47.969.082.632**	***Total cash in banks***

Tidak terdapat saldo kas di bank yang dibatasi penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

There is no restricted cash in bank as of 31 December 2025 and 2024.

5. PIUTANG USAHA

5. TRADE RECEIVABLES

	2025	2024	
Pihak ketiga	521.363.430.478	215.052.118.911	*Third parties*
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha	(398.559.457.262)	(137.814.997.350)	*Less allowance for impairment losses receivables*
Piutang usaha, bersih	**122.803.973.216**	**77.237.121.561**	***Trade receivables, net***

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The detailed aging schedule of the trade receivables were as follows:

	2025	2024	
Belum jatuh tempo:	105.065.377.879	49.054.071.346	*Not yet due:*
Lewat jatuh tempo			*Past due:*
0 - 30 hari	17.738.595.337	28.183.050.215	*0 - 30 days*
Piutang usaha, bersih	**122.803.973.216**	**77.237.121.561**	***Trade receivables, net***

Perubahan provisi penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

The changes in the provision for impairment of trade receivables were as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	137.814.997.350	-	*Beginning balance*
Penyisihan tahun berjalan (Catatan 20)	260.744.459.912	137.814.997.350	*Allowance for the year (Note 20)*
Saldo akhir	**398.559.457.262**	**137.814.997.350**	***Ending balance***

5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Berdasarkan hasil penelahaan terhadap adanya penurunan nilai pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha diatas cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai piutang tersebut.

Penerimaan Piutang Usaha oleh Perusahaan dari Januari 2026 sampai dengan Maret 2026 sebesar Rp122.517.563.724,-.

5. TRADE RECEIVABLES (Continued)

Based on the results of review for impairment at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment of trade receivables is sufficient to cover losses from impairment of such receibales.

Receipt of Accounts Receivable by the Company from January 2026 to March 2026 amounting to IDR122,517,563,724.-.

6. PIUTANG LAIN-LAIN

6. OTHER RECEIVABLES

	2025	2024	
Pihak ketiga	170.538.040	125.541.352	*Third parties*
Jumlah	**170.538.040**	**125.541.352**	***Total***

7. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

7. PREPAID EXPENSES

	2025	2024	
Sewa kantor & apartemen	2.825.525.377	1.285.288.320	*Office rent & apartment*
Asuransi karyawan	522.586.434	204.180.597	*Employee insurance*
Validasi data pelanggan	46.150.500	371.229.239	*Customer data validation*
Komunikasi	20.348.812	331.103.830	*Communication*
Lain-lain	448.720.007	122.600.457	*Others*
Jumlah	**3.863.331.130**	**2.314.402.443**	***Total***

8. ASET TETAP

8. FIXED ASSETS

31 Desember 2025 / *December 31, 2025*

	Saldo awal/ *Beginning Balances*	**Penambahan/** *Additions*	**Pelepasan/** *Disposals*	**Reklasifikasi/** *Reclassification*	**Saldo akhir/** *Ending Balances*	
Harga perolehan:						***Acquisition costs:***
Perabotan & perlengkapan kantor	458.837.200	577.486.000	-	1.559.000 -	1.037.882.200	*Office furniture & fixtures*
Peralatan elektronik	2.459.528.003	2.490.165.661	-	(1.559.000)	4.948.134.664	*Electronic Equipment*
Peralatan kantor	-	14.020.725	-	-	14.020.725	*Office equipment*
Renovasi ruko sewa	2.393.974.463	2.183.548.822	-		4.577.523.285	*Leasehold improvement*
Sub jumlah	5.312.339.666	5.265.221.208	-	-	10.577.560.874	*Sub total*
Akumulasi penyusutan:						***Accumulated depreciation:***
Perabotan & perlengkapan kantor	(199.544.558)	(329.514.317)	-	(876.938)	(529.935.813)	*Office equipments*
Peralatan elektronik	(1.320.488.940)	(1.317.674.299)	-	876.938	(2.637.286.301)	*Electronic equipment*
Peralatan kantor	-	(3.795.594)	-	-	(3.795.594)	*Office equipment*
Renovasi ruko sewa	(745.509.550)	(1.521.622.398)	-	-	(2.267.131.948)	*Leasehold improvement*
Sub jumlah	(2.265.543.048)	(3.172.606.608)	-	-	(5.438.149.656)	*Sub total*
Nilai Buku	**3.046.796.618**				**5.139.411.218**	***Net Book Value***

31 Desember 2024 / *December 31, 2024*

	Saldo awal/ *Beginning Balances*	**Penambahan/** *Additions*	**Pelepasan/** *Disposals*	**Reklasifikasi/** *Reclassification*	**Saldo akhir/** *Ending Balances*	
Harga perolehan:						***Acquisition costs:***
Perabotan & perlengkapan kantor	256.327.700	202.509.500	-	-	458.837.200	*Office furniture & fixtures*
Peralatan elektronik	1.469.527.003	990.001.000	-	-	2.459.528.003	*Electronic Equipment*
Renovasi ruko sewa	762.756.119	1.631.218.344	-	-	2.393.974.463	*Leasehold improvement*
Sub jumlah	2.488.610.822	2.823.728.844	-	-	5.312.339.666	*Sub total*
Akumulasi penyusutan:						***Accumulated depreciation:***
Perabotan & perlengkapan kantor	(145.452.639)	(54.091.919)	-	-	(199.544.558)	*Office equipments* *Office furniture & fixtures*
Peralatan elektronik	(829.373.768)	(491.115.172)	-	-	(1.320.488.940)	*Electronic Equipment*
Renovasi ruko sewa	(496.307.080)	(249.202.470)	-	-	(745.509.550)	*Leasehold improvement*
Sub jumlah	(1.471.133.487)	(794.409.561)	-	-	(2.265.543.048)	*Sub total*
Nilai Buku	**1.017.477.335**				**3.046.796.618**	***Net Book Value***

Beban penyusutan aset tetap telah dialokasikan pada beban administrasi dan umum lihat catatan 20.

Depreciation expense for fixed assets has been allocated to administrative and general expenses, see note 20.

9. ASET HAK GUNA DAN LIABILITAS SEWA

Berdasarkan Perubahan Ketiga tanggal 24 Desember 2024 terhadap Perjanjian Sewa Ref. MPP/CP/MGT/341/LA/020 tertanggal 5 November 2019 antara PT Mahkota Prima Properti dan PT Digital Synergy Technology sebagaimana dinovasikan kepada PT Info Tekno Siaga berdasarkan Perjanjian Novasi tertanggal 28 Februari 2020 antara PT Mahkota Prima Properti, PT Digital Synergy Technology dan PT Info Tekno Siaga, dan terakhir dengan Surat Perjanjian tertanggal 31 Agustus 2023. Surat Perubahan Ketiga ini yang akan berlaku efektif pada tanggal 4 Januari 2025 hingga 3 Januari 2028.

9. RIGHT OF USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES

Based on the Third Amendment dated December 24, 2024 to the Lease Agreement Ref. MPP/CP/MGT/341/LA/020 dated November 5, 2019 between PT Mahkota Prima Properti and PT Digital Synergy Technology as novated to PT Info Tekno Siaga based on the Novation Agreement dated February 28, 2020 between PT Mahkota Prima Properti, PT Digital Synergy Technology and PT Info Tekno Siaga, and finally by the Agreement dated August 31, 2023. This Third Amendment shall be effective from January 4, 2025 to January 3, 2028.

a. Aset hak guna / ***a. Right of use assets***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*				
	Saldo awal/ *Beginning balances*	**Penambahan/** *Additions*	**Pelepasan/** *Disposals*	**Saldo akhir/** *Ending Balances*	
Harga Perolehan:					***Acquisition costs:***
Gedung	3.734.909.327	5.210.365.646	-	8.945.274.973	*Building*
Sub jumlah	3.734.909.327	5.210.365.646	-	8.945.274.973	*Sub total*
Akumulasi penyusutan:					***Accumulated depreciation:***
Gedung	(3.734.909.327)	(1.522.293.507)	-	(5.257.202.834)	*Building*
Sub jumlah	(3.734.909.327)	(1.522.293.507)	-	(5.257.202.834)	*Sub total*
Nilai Buku	**-**			**3.688.072.139**	***Net Book Value***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*				
	Saldo awal/ *Beginning balances*	**Penambahan/** *Additions*	**Pelepasan/** *Disposals*	**Saldo akhir/** *Ending Balances*	
Harga Perolehan:					***Acquisition costs:***
Gedung	3.727.147.276	7.762.051	-	3.734.909.327	*Building*
Sub jumlah	3.727.147.276	7.762.051	-	3.734.909.327	*Sub total*
Akumulasi penyusutan:					***Accumulated depreciation:***
Gedung	(2.942.484.692)	(792.424.635)	-	(3.734.909.327)	*Building*
Sub jumlah	(2.942.484.692)	(792.424.635)	-	(3.734.909.327)	*Sub total*
Nilai Buku	**784.662.584**			**-**	***Net Book Value***

b. Liabilitas sewa / ***b. Lease liabilities***

	2025	**2024**	
Jatuh tempo			***Due date:***
Jangka pendek	1.844.018.059	-	*Short- term*
Jangka panjang	1.844.054.080	-	*Long-term*
Jumlah	**3.688.072.139**	**-**	***Total***

Beban penyusutan aset hak guna telah dialokasikan pada beban administrasi dan umum lihat catatan 20.

Depreciation expense for right-of-use assets has been allocated to administrative and general expenses, see note 20.

10. ASET TAK BERWUJUD

10. INTANGIBLE ASSETS

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/** *Additions*	**Pelepasan/** *Disposals*	**Saldo akhir/** *Ending Balances*	
Aplikasi perangkat P2P	7.871.000.000	-	-	7.871.000.000	*P2P software application*
Akumulasi amortisasi	(2.951.625.000)	(1.967.750.000)	-	(4.919.375.000)	*Accumulated amortization*
Nilai Buku	4.919.375.000	(1.967.750.000)	**-**	**2.951.625.000**	***Net Book Value***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/** *Additions*	**Pelepasan/** *Disposals*	**Saldo akhir/** *Ending Balances*	
Aplikasi perangkat P2P	7.871.000.000	-	-	7.871.000.000	*P2P software application*
Akumulasi amortisasi	(983.875.000)	(1.967.750.000)	-	(2.951.625.000)	*Accumulated amortization*
Nilai Buku	6.887.125.000	(1.967.750.000)	**-**	**4.919.375.000**	***Net Book Value***

Aplikasi perangkat lunak P2P tersebut berasal dari hibah perangkat lunak yang diberikan oleh Digital Technologies HK Limited. Hibah perangkat lunak tersebut sesuai dengan Akta Notaris Nomor 17 yang dibuat dihadapan Notaris Yudie Reza Haryansyah, SH, M.Kn pada tanggal 19 Oktober 2023.

The P2P software application comes from a software grant provided by Digital Technologies HK Limited. The software grant is in accordance with Notarial Deed Number 17 made before Notary Yudie Reza Haryansyah, SH, M.Kn on October 19 2023.

10. ASET TAK BERWUJUD (Lanjutan) / *10. INTANGIBLE ASSETS (Continued)*

Pada tanggal 25 Oktober 2023, Perusahaan melakukan penilaian aplikasi perangkat lunak P2P tersebut yang dilakukan oleh penilai independen yakni KJPP Syarif, Endang dan Rekan dengan hasil sebagai berikut:

- Nilai wajar atas aplikasi perangkat lunak P2P adalah sebesar Rp7.871.000.000,-.
- Pendekatan yang digunakan untuk menilai aplikasi perangkat lunak P2P adalah pendekatan pendapatan dengan metode *excess earning* dan pendekatan biaya dengan metode biaya pengganti baru.
- Nomor laporan hasil penilaian tersebut adalah 00043/2.0113-03/BS/09/0340/1/X/2023 Tanggal 25 Oktober 2023.

Beban amortisasi aset tak berwujud telah dialokasikan pada beban pokok pendapatan (Catatan 18).

On October 25 2023, the Company carried out an assessment of the P2P software application which was carried out by independent assessors namely KJPP Syarif, Endang and Rekan with the following results:

- The fair value of the P2P software application is IDR 7,871,000,000.
- *The approach used to assess P2P software applications is the income approach using the excess earning method and the cost approach using the new replacement cost method.*
- *The assessment result report number is 00043/2.0113-03/BS/09/0340/1/X/2023 dated 25 October 2023.*

Intangible asset amortization expenses have been allocated to cost of revenue, (Note 18).

11. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA / *11. OTHER NON-CURRENT ASSETS*

	2025	2024	
Jaminan (sewa kantor & apartemen)	1.228.809.225	642.877.375	*Security deposit (rent office & apartment)*
Jumlah	**1.228.809.225**	**642.877.375**	***Total***

12. UTANG USAHA / *12. TRADE PAYABLES*

	2025	2024	
a. Berdasarkan hubungan:			***Based on relationships: a.***
Pihak ketiga			*Third parties*
Dollar Amerika Serikat	19.492.025.327	50.059.957.542	*US Dollar*
Rupiah	20.265.544.431	6.043.850.503	*Rupiah*
Sub jumlah	**39.757.569.758**	**56.103.808.045**	***Sub Total***
Pihak berelasi			*Related parties*
Rupiah	3.492.483.696	1.692.742.899	*Rupiah*
Sub jumlah	3.492.483.696	1.692.742.899	***Sub Total***
Jumlah	**43.250.053.454**	**57.796.550.944**	***Total***

b. Rincian berdasarkan daftar umur: / ***Details based on age list: b.***

	2025	2024	
0 - 30 hari	34.945.890.196	57.610.457.965	*0 - 30 days*
31-60 hari	8.304.163.258	186.092.979	*31-60 days*
Jumlah	**43.250.053.454**	**57.796.550.944**	***Total***

Saldo utang usaha terutama untuk kegiatan pemasaran, pemeliharaan IT, validasi data pelanggan dan penagihan.

The balance of trade payables is mainly arose for marketing activities, IT maintenance, customer data validation and collection.

13. PERPAJAKAN / *13. TAXATION*

a. Utang pajak / *a. Taxes payables*

	2025	2024	
Pajak penghasilan:			*Income tax:*
Pasal 4(2)	50.914.088	2.990.088	*Article 4(2)*
Pasal 21	264.081.274	294.020.887	*Article 21*
Pasal 23	344.691.765	169.204.388	*Article 23*
Pasal 25	853.652.305	403.927.168	*Article 25*
Pasal 26	475.139.164	1.615.041.679	*Article 26*
Pasal 29	154.689.151	6.430.060.452	*Article 29*
Pajak Pertambahan Nilai	8.542.435.430	4.324.318.798	*Value Added Tax*
Jumlah	**10.685.603.177**	**13.239.563.460**	***Total***

b. Beban pajak penghasilan / *b. Income tax expense*

	2025	2024	
Pajak kini	(9.049.341.400)	(10.243.827.660)	*Current taxes*
Pajak tangguhan	1.904.201.971	1.706.348.798	*Deferred taxes*
Jumlah	**(7.145.139.429)**	**(8.537.478.862)**	***Total***

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komersial dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before provision for income tax, as shown in statements of profit and loss and estimated taxable income is as follows:

13. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *13. TAXATION (Continued)*

b. Beban pajak penghasilan (Lanjutan) / *b. Income tax expense (Continued)*

	2025	2024	
Laba sebelum beban pajak penghasilan	31.363.849.109	38.420.344.813	*Profit before income taxes*
Perbedaan tetap:			***Permanent differences:***
Beban karyawan	674.659.177	493.246.581	*Employee expense*
Beban pajak penghasilan	2.497.839.428	1.046.883.202	*Witholding tax expenses*
Beban sosial media	-	89.230.715	*Social media expenses*
Beban sumbangan & hiburan	113.658.240	35.368.499	*Donation & entertainment expenses*
Pendapatan bunga	(2.753.980.748)	(1.116.391.296)	*Interest income*
Pendapatan lain dari sewa menyewa	(19.139.175)	(185.078.260)	*Other income of sublease*
Beban penalti pajak	574.475.252	64.976.675	*Penalty taxes*
Jumlah beda tetap	**1.087.512.174**	**428.236.116**	***Total permanent difference***
Perbedaan waktu:			***Timing differences:***
Pendapatan hibah	(1.967.750.000)	(1.967.750.000)	*Grant incomes*
Pembayaran imbalan kerja	(832.698.000)	(133.335.000)	*Payment of employee benefits*
Penyusutan aset tetap	695.033.589	196.469.518	*Depreciation of fixed asset*
Penyusutan aset hak guna	(8.402.751)	-	
Beban imbalan kerja	-	668.050.000	*Employee benefit expense*
Penyisihan piutang tak tertagih	10.795.825.033	8.950.836.600	*Allowance for impairment loss of trade receivables*
Jumlah beda waktu	**8.682.007.871**	**7.714.271.118**	***Total timing difference***
Laba kena pajak	**41.133.369.154**	**46.562.852.047**	***Taxable income***
Laba kena pajak pembulatan	**41.133.370.000**	**46.562.853.000**	***Taxable income - rounding***
Pajak kini	**9.049.341.400**	**10.243.827.660**	***Current taxes***
Pajak dibayar dimuka:			***Prepaid taxes:***
PPh pasal 25	8.894.652.249	3.813.767.208	*Article 25*
Jumlah	**8.894.652.249**	**3.813.767.208**	***Total***
PPh pasal 29	**154.689.151**	**6.430.060.452**	***Article 29***

c. Aset pajak tangguhan / *c. Deferred tax assets*

2025

	Saldo awal/ *Beginning balances*	**Pengaruh ke laba rugi/** *Charged to the profit and loss*	**Penghasilan komprehensif lainnya/***Other comprehensive income*	**Saldo akhir/** *Ending balances*	
Imbalan pasca kerja	330.565.180	(183.193.560)	15.050.860	162.422.480	*Post employment benefits*
Penyusutan	31.035.075	145.219.024	-	176.254.099	*Depreciation*
Pendapatan ditangguhkan	1.082.262.500	(432.905.000)	-	649.357.500	*Deferred revenue*
Penyisihan piutang tak tertagih	1.969.184.052	2.375.081.507	-	4.344.265.559	*Allowance for impairment loss of trade receivables*
Jumlah	**3.413.046.807**	**1.904.201.971**	**15.050.860**	**5.332.299.638**	***Total***

2024

	Saldo awal/ *Beginning balances*	**Pengaruh ke laba rugi/** *Charged to the profit and loss*	**Penghasilan komprehensif lainnya/***Other comprehensive income*	**Saldo akhir/** *Ending balances*	
Imbalan pasca kerja	227.583.400	117.637.300	(14.655.520)	330.565.180	*Post employment benefits*
Penyusutan	(21.397.371)	52.432.446	-	31.035.075	*Depreciation*
Pendapatan ditangguhkan	1.515.167.500	(432.905.000)	-	1.082.262.500	*Deferred revenue*
Penyisihan piutang tak tertagih	-	1.969.184.052	-	1.969.184.052	*Allowance for impairment loss of trade receivables*
Jumlah	**1.721.353.529**	**1.706.348.798**	**(14.655.520)**	**3.413.046.807**	***Total***

14. BEBAN AKRUAL / *14. ACCRUED EXPENSES*

	2025	2024	
Perikanan online	41.873.661.000	-	*Online advertising*
Pengembangan dan pemeliharaan IT	10.555.361.847	2.352.465.776	*Development and maintenance IT*
Validasi data pelanggan	7.071.918.195	1.088.453.132	*Customer data validation*
Biaya penagihan	3.169.773.176	507.658.442	*Collection cost*
SMS gateway	2.278.064.428	-	*SMS gateway*
Beban karyawan	816.136.608	1.108.046.675	*Employee expenses*
Lain-lain	36.230.152	82.431.860	*Others*
Jumlah	**65.801.145.406**	**5.139.055.885**	***Total***

15. PENDAPATAN DITANGGUHKAN / *15. DEFERRED REVENUES*

	2025	2024	
Liabilitas lancar			***Short – term***
Hibah	1.967.750.000	1.967.750.000	*Grant*
	1.967.750.000	1.967.750.000	
Liabilitas tidak lancar			***Long – term***
Hibah	983.875.000	2.951.625.000	*Grant*
	983.875.000	2.951.625.000	
Jumlah	**2.951.625.000**	**4.919.375.000**	***Total***

Hibah diatas berupa aplikasi perangkat lunak P2P yang diberikan oleh Digital Technologies HK Limited. Hibah perangkat lunak tersebut sesuai dengan Akta Notaris Nomor 17 yang dibuat dihadapan Notaris Yudie Reza Haryansyah, SH, M.Kn pada tanggal 19 Oktober 2023 (Catatan 10).

The above grant is in the form of a P2P software application provided by Digital Technologies HK Limited. The software grant is in accordance with Notarial Deed Number 17 made before Notary Yudie Reza Haryansyah, SH, M.Kn on October 19 2023 (Note 10).

Perusahaan akan melakukan amortisasi pendapatan hibah selama 4 (empat) tahun (Catatan 21).

The company will amortize grant income over 4 (four) years (Note 21).

16. MODAL SAHAM / *16. SHARE CAPITAL*

Susunan pemegang saham Entitas dan persentase kepemilikannya pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The composition of share ownership of Entity's shareholders and their respective percentage of ownership as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

2025 & 2024

Pemegang Saham/ *Shareholders*	**Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor (Lembar)** / *Number of Shares Issued and Fully Paid (Share)*	**Persentase Kepemilikan** / *Percentage Ownership*	***Jumlah*** / *Total*
Digital Technologies HK Limited	68.000	85%	6.800.000.000
PT Info Tekno Selaras	12.000	15%	1.200.000.000
Jumlah	**80.000**	**100%**	**8.000.000.000**

1. Akta Notaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 21 tanggal 28 Februari 2020 dari Yudie Reza Haryansyah S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan di setor menjadi 50.000 lembar, pemberhentian dan pengangkatan dewan direksi. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan no. AHU.AH.01.03- 0123897 tertanggal 5 Maret 2020.

   1. Notarial Deed of statement of shareholder's resolution No. 21 dated February 28, 2020 of Yudie Reza Haryansyah S.H., M.Kn., Notary in Bekasi, concerning the increment of issued and fully paid shares to become 50,000 shares, termination and appointment of board of directors. The deed was approval by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia By His Decision Letter No. AHU.AH.01.03-012897 dated March 5, 2020.

2. Akta Notaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 3 tanggal 8 Mei 2020 dari Yudie Reza Haryansyah S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan di setor menjadi 80.000 lembar. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan no. AHU.AH.01.03-0222682 dan AHU.AH.01.03-0222687 tertanggal 18 Mei 2020.

   2. Notarial Deed of statement of shareholder's resolution No. 3 dated May 8, 2020 of Yudie Reza Haryansyah S.H., M.Kn., Notary in Bekasi, concerning the increment of issued and fully paid shares to become 80,000 shares. The deed was approval by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia By His Decision Letter No. AHU.AH.01.03-0222682 and AHU.AH.01.03-0222687 dated May 18, 2020.

3. Pada tanggal 10 Agustus 2023, Perusahaan telah melakukan Perubahan Anggaran Dasar terkait perubahan kembali modal dasar Perusahaan yang semula sebesar 600.000 (enam ratus ribu) lembar saham menjadi 120.000 (seratus dua puluh) lembar saham. Penurunan modal tersebut diakta oleh Notaris Yudie Reza Haryansyah, SH, M,Kn sesuai salinan akta nomor 5 tanggal 10 Agustus 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Info Tekno Siaga. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0060080.AH.01.02.Tahun 2023 tertanggal 4 Oktober 2023.

   3. On August 10 2023, the Company amended its Articles of Association regarding the change in the authorized capital of the Company from 600,000 (six hundred thousand) shares to 120,000 (one hundred and twenty) shares. The reduction in capital was notarized by Notary Yudie Reza Haryansyah, SH, M, Kn according to the copy of deed number 5 dated 10 August 2023 concerning Amendments to the Articles of Association of PT Info Tekno Siaga. This deed has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0060080.AH.01.02.Year 2023 dated 4 October 2023.

17. PENDAPATAN / *17. REVENUE*

	2025	2024	
Komisi penyelenggara	1.070.263.321.112	597.893.248.549	*Platform commission*
Jumlah	**1.070.263.321.112**	**597.893.248.549**	***Total***

18. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *18. COST OF REVENUE*

	2025	2024	
Biaya penagihan	85.545.149.042	37.444.876.184	*Collection cost*
Validasi data pelanggan	79.664.817.179	32.476.879.279	*Customer data validation*
Komisi payment gateway	21.683.183.672	15.264.036.494	*Payment gateway fee*
SMS gateway	16.323.057.152	10.830.750.232	*SMS gateway*
Pengembangan dan pemeliharaan IT	12.494.429.803	12.955.698.188	*Development and maintenance IT*
Amortisasi aset tak berwujud (Catatan 10)	1.967.750.000	1.967.750.000	*Amortization of intangible assets (Note 10)*
Jumlah	**217.678.386.848**	**110.939.990.377**	***Total***

19. BEBAN PEMASARAN / *19. MARKETING EXPENSES*

	2025	2024	
Periklanan *online*	508.432.012.534	280.938.682.433	*Online advertising*
Promosi	6.780.847.079	2.359.769.454	*Promotion*
Jumlah	**515.212.859.613**	**283.298.451.887**	***Total***

20. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *20. GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES*

	2025	2024	
Penyisihan penghapusan piutang (Catatan 5)	260.744.459.912	137.814.997.350	*Allowance for impairment losses on trade receivables (Note 5)*
Beban karyawan	32.906.299.695	22.056.444.426	*Employee expenses*
Penyusutan aset tetap (Catatan 8)	3.172.606.608	794.409.561	*Depreciation of fixed assets (Note 8)*
Sewa	2.305.512.502	933.972.465	*Rent*
Pajak lainnya	1.550.733.622	417.324.252	*Other tax*
Penyusutan aset hak guna (Catatan 9)	1.522.293.507	792.424.635	*Depreciation of right of use (Note 9)*
Beban kantor	1.341.481.586	758.938.897	*Office expenses*
Internet dan komunikasi	1.086.690.450	445.094.678	*Internet and communications*
Pajak penghasilan	947.328.556	629.558.950	*Withholding tax*
Jasa profesional	661.187.117	924.704.624	*Professional fees*
Perangkat lunak dan server	575.965.682	287.272.616	*Software and server*
Denda pajak	574.475.252	64.976.675	*Penalty Taxes*
Hiburan/Jamuan	462.683.758	126.801.778	*Entertainment*
Perjalanan dinas	223.617.433	285.700.679	*Business travel*
Pelatihan dan seminar	210.654.367	338.154.229	*Training and seminar*
Perbaikan dan pemeliharaan	199.063.150	54.147.168	*Repairs & Maintenance Expenses*
Iuran keanggotaan	191.277.521	106.875.000	*Membership fees*
Administrasi bank	178.875.845	169.562.890	*Bank charges*
Imbalan kerja (Catatan 22)	-	668.050.000	*Post employee benefit (Note 22)*
Lain-lain (dibawah Rp100.000.000)	202.550.191	116.861.571	*Others (below IDR100,000,000)*
Jumlah	**309.057.756.754**	**167.786.272.444**	***Total***

21. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN / *21. OTHER INCOME (EXPENSE)*

	2025	2024	
Pendapatan bunga	2.753.980.748	1.115.286.196	*Interest income*
Pendapatan hibah (Catatan 15)	1.967.750.000	1.967.750.000	*Grant income (Note 15)*
Imbalan kerja (Catatan 22)	416.822.000	-	*Post employee benefit (Note 22)*
Sub-sewa	-	185.078.260	*Sub-lease*
Lain-lain (dibawah Rp50.000.000)	19.139.174	1.105.100	*Others (below IDR50,000,000)*
Jumlah pendapatan lain-lain	**5.157.691.922**	**3.269.219.556**	***Total other income***
Kerugian selisih kurs	2.099.757.960	712.637.939	*Foreign exchange loss*
Bunga atas liabilitas sewa	8.402.750	4.770.645	*Lease interest expenses*
Jumlah beban lain-lain	**2.108.160.710**	**717.408.584**	***Total other expense***
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	**3.049.531.212**	**2.551.810.972**	***Total other income (expense)***

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN / *22. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES*

Perhitungan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 7 April 2026 berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits Laporan No. 1763/ST-EP-PSAK219-ITSI/IV/2026.

The calculation of provision for employee benefit as of April 7, 2026 was based on the report of Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits No. 1763/ST-EP-PSAK219-ITSI/IV/2026.

Perhitungan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 14 Maret 2025 berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits Laporan No. 1455/MR-EP-PSAK219-ITSI/III/2025.

The calculation of provision for employee benefit as of 14 March 2025 was based on the report of Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits No. 1455/MR-EP-PSAK219-ITSI/III/2025.

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (Lanjutan)

Imbalan kerja yang dihitung dalam laporan ini adalah Imbalan Pascakerja ("IPK") sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No.6/2023, Peraturan Pemerintah No. 35/2021 (PP 35/2021) dan Peraturan Perusahaan (PP).

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program. Namun, sebagian akan di *offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Asumsi utama yang digunakan untuk menentukan estimasi biaya oleh aktuaris independen adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Tingkat diskonto (per tahun)	6,85%	7,15%	*Interest discount rate (per year)*
Kenaikan gaji (per tahun)	5%	5%	*Salary increase (per year)*
Umur pensiun normal (per tahun)	58 tahun	58 tahun	*Normal pension age (per year)*

Beban manfaat karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

Beban manfaat karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah:

	2025	2024	
Biaya jasa kini	263.277.000	418.536.000	*Current service costs*
BJL-amandemen	(1.027.455.000)	-	*PSC-amendment*
BJL-kurtailmen	-	-	*PSC-curtailment*
Biaya jasa lalu	-	59.216.000	*Past service costs*
Biaya bunga	32.480.000	69.463.000	*Interest costs*
Total biaya	**(731.698.000)**	**547.215.000**	***Total cost***
Kelebihan pembayaran	314.876.000	120.835.000	*Excess of benefit paids*
Beban yang diakui dalam laporan laba rugi	**(416.822.000)**	**668.050.000**	***Expense recognized in statements of profit or loss***

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Saldo awal	1.502.569.000	1.034.470.000	*Beginning balance*
Beban imbalan kerja tahun berjalan	(416.822.000)	668.050.000	*Employee benefit expense for current year*
Pembayaran imbalan oleh perusahaan	(101.000.000)	(12.500.000)	*Benefit paid by company*
Pendapatan yang diakui di penghasilan komprehensif lain	68.413.000	(66.616.000)	*Profit recognize in other comprehensive income*
Kelebihan pembayaran imbalan	(314.876.000)	(120.835.000)	*Excess benefits paid*
Saldo akhir	**738.284.000**	**1.502.569.000**	***Ending balance***

22. *POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (Continued)*

The employee benefits calculated in this report are Post-Employment Benefits ("IPK") as regulated by Law No.6/2023, Government Regulation No. 35/2021 (PP 35/2021) and Company Regulations (PP).

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability. However, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Longevity Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants both during and after their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

The main assumptions used to determine the estimated cost by an independent actuary are as follows:

Employees' benefits cost for the years ended December 31, 2025 and 2024 based on actuary calculation are as follows:

Employee benefit expenses recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income are:

Liabilities mutation recognized in the statements of financial position are as follows:

23. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan tingkat harga wajar dan syarat normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga. Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak berelasi/*Related parties*	**Sifat Hubungan**/*Nature of relationship*	***Transaksi***/*Transactions*
PT Digital Synergy Technology	Perusahaan sepengendali/ *Under common control*	Piutang lain-lain, utang usaha/ *Other receivables, trade payables*
PT Vela Inovasi Teknologi	Perusahaan sepengendali/ *Under common control*	Utang usaha/ *Trade payables*

23. *BALANCES AND SIGNIFICANT TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

In the normal course of business, the Company entered into financial and business transactions with related parties. Transactions with related parties are conducted on normal terms as fair and conducted by a third party. Nature of relationship with related parties are as follows:

23. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

23. BALANCES AND SIGNIFICANT TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

a. Saldo yang timbul dari akun "Utang Usaha Pihak Berelasi" tersebut pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan dalam laporan posisi keuangan dengan rincian sebagai berikut:

a. The balances constitude "Trade payables related parties" in December 31, 2025 and 2024 were presented in the financial position as follows:

	2025	2024	
PT Vela Inovasi Teknologi	3.281.227.000	1.391.625.084	*PT Vela Inovasi Teknologi*
PT Digital Synergy Technology	211.256.696	301.117.815	*PT Digital Synergy Technology*
Jumlah	**3.492.483.696**	**1.692.742.899**	***Total***

24. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

24. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

	2025		2024		
	Mata uang asing/ *Foreign Currency* **USD**	**Setara rupiah/** *Equivalent to* ***Rupiah***	**Mata uang asing/** *Foreign Currency* ***USD***	**Setara rupiah/** *Equivalent to* ***Rupiah***	
Aset					***Assets***
Kas di bank	5.309	89.093.121	18.585	300.374.972	*Cash in banks*
Jumlah aset		**89.093.121**		**300.374.972**	***Total assets***
Liabilitas					***Liabilities***
Utang usaha					*Trade payables*
- Pihak ketiga	1.161.484	19.492.025.327	3.097.386	50.059.957.542	*Third parties* -
Jumlah liabilitas		**19.492.025.327**		**50.059.957.542**	***Total liabilities***
Jumlah liabilitas bersih		**(19.402.932.206)**		**(49.759.582.570)**	***Total net liabilities***

25. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

25. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK

a. Kategori dan kelas instrumen keuangan

a. Categories and classes of financial instruments

	2025				
	Aset pada biaya perolehan/ *Assets at amortized cost*	**Aset pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/** *Assets fair value through other comprehensive income (FVTOCI)*	**Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/** *Liabilities at amortized cost*	**Liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/** *Liabilities at fair value through profit and loss*	
Aset keuangan lancar					***Current financial assets***
Kas di bank	63.173.200.609	-	-	63.173.200.609	*Cash in banks*
Piutang usaha	122.803.973.216	-	-	122.803.973.216	*Trade receivables*
Jumlah	**185.977.173.825**	-	-	**185.977.173.825**	***Total***
Liabilitas keuangan lancar					***Current financial liabilities***
Utang usaha:					*Trade payables:*
Pihak ketiga	-	-	39.757.569.758	39.757.569.758	*Third parties*
Pihak berelasi	-	-	3.492.483.696	3.492.483.696	*Related parties*
Beban akrual	-	-	65.801.145.406	65.801.145.406	*Accrued expenses*
Jumlah	**-**	**-**	**109.051.198.860**	**109.051.198.860**	***Total***

	2024				
	Aset pada biaya perolehan/ *Assets at amortized cost*	**Aset pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/** *Assets fair value through other comprehensive income (FVTOCI)*	**Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/** *Liabilities at amortized cost*	**Liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/** *Liabilities at fair value through profit and loss*	
Aset keuangan lancar					***Current financial assets***
Kas di bank	47.969.082.632	-	-	47.969.082.632	*Cash in banks*
Piutang usaha	77.237.121.561	-	-	77.237.121.561	*Trade receivables*
Jumlah	**125.206.204.193**	-	-	**125.206.204.193**	***Total***

25. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

25. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK (Continued)

a. Kategori dan kelas instrumen keuangan (Lanjutan)

a. Categories and classes of financial instruments (Continued)

	2024				
	Aset pada biaya perolehan/ *Assets at amortized cost*	**Aset pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/** *Assets fair value through other comprehensive income (FVTOCI)*	**Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/** *Liabilities at amortized cost*	**Liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/** *Liabilities at fair value through profit and loss*	
Liabilitas keuangan lancar					***Current financial liabilities***
Utang usaha:					*Trade payables:*
Pihak ketiga	-	-	56.103.808.045	56.103.808.045	*Third parties*
Pihak berelasi	-	-	1.692.742.899	1.692.742.899	*Related parties*
Beban akrual	-	-	5.139.055.885	5.139.055.885	*Accrued expenses*
Jumlah	**-**	**-**	**62.935.606.829**	**62.935.606.829**	***Total***

b. Manajemen risiko keuangan

b. Financial risk management

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Entitas adalah risiko mata uang asing, risiko tingkat bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Entitas telah menerapkan manajemen risiko keuangan dan kebijakannya untuk memastikan kecukupan sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, risiko tingkat bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Ringkasan dari kebijakan manajemen risiko keuangan adalah sebagai berikut:

The principal risks arising from The Entity's financial instruments are foreign currency risk, interest rate risk, credit risk and liquidity risk. The Entity has established financial risk management and policy which seeks to ensure that adequate financial resources are available for the development of The Entity's business while managing its foreign currency, interest rate, credit and liquidity risks. The summary of the financial risk management policies are as follows:

Manajemen risiko tingkat bunga

Interest rate risk management

Risiko tingkat bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas di masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan tingkat bunga pasar.

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of the changes in market interest rates.

Eksposur Entitas pada fluktuasi tingkat bunga pasar adalah minimal karena utang bank dan utang pembelian kendaraan memiliki tingkat bunga tetap (mengacu pada tabel risiko likuiditas dan tingkat bunga pada poin (iv) di bawah).

The Entity's exposure to the market interest fluctuation is minimal because its bank loans and liabilities for purchases of vehicles carries interest at fixed rates (refer to liquidity and interest rate risks table in section (iv) below).

Untuk mengelola risiko tingkat bunga, manajemen mempertimbangkan di awal dan menyetujui sumber pembiayaan yang tepat yang dapat memberikan tingkat bunga kompetitif serta secara teratur memonitor pergerakan tingkat bunga untuk menentukan langkah yang tepat.

To manage the interest rate risk, management considers upfront and approves the appropriate source of financing that would provide competitive interest rate and regularly monitors interest rate movement to determine appropriate measures.

Risiko manajemen kredit

Credit risk management

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi liabilitas kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian keuangan bagi Entitas.

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligation resulting in financial loss to The Entity.

Risiko kredit Entitas terutama melekat pada kas di bank, piutang usaha, piutang lain-lain dan uang jaminan. Entitas menempatkan saldo bank dan deposito berjangka pada institusi keuangan yang layak dan terpercaya untuk diversifikasi pendapatan bunga dan penyebaran risiko. Piutang usaha dilakukan dengan pihak ketiga terpercaya dan pihak berelasi, sedangkan piutang lain-lain dilakukan dengan pihak ketiga terpercaya.

The Entity's credit risk is primarily attributed to its cash in banks, trade accounts receivable, other accounts receivable and refundable deposits. The Entity places its bank balances and time deposits with credit worthy financial institutions to diversify interest income and spread risk. Trade accounts receivable are entered with credit worthy third parties and related party, while other accounts receivable are entered with credit worthy third parties.

Eksposur Entitas dan pihak lawan dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara pihak lawan yang telah disetujui. Eksposur kredit dikendalikan oleh batasan (*limit*) pihak lawan yang direviu dan disetujui oleh manajemen.

The Entity's exposure and its counterparties are continuously monitored and the aggregate value of transactions concluded is spread amongst approved counterparties. Credit exposure is controlled by counterparty's limit that is reviewed and approved by management.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian, setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai mencerminkan eksposur maksimal Entitas terhadap risiko kredit.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for impairment losses represents The Entity's maximum exposure to credit risk.

Kualitas kredit aset keuangan yang tidak lewat jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai didasarkan pada pemeringkat kredit internal yang didasarkan pada data historis atas gagal bayar pihak lawan.

The credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired is based on internal credit rating which is based on historical data on default of the counterparties.

Atas aset keuangan yang tidak lewat jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai, Entitas berkeyakinan bahwa aset keuangan tersebut dapat diperoleh kembali dengan nilai penuh. Sedangkan atas aset keuangan yang telah jatuh tempo, Entitas berkeyakinan bahwa pencadangan penurunan nilai yang dilakukan dapat menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan tersebut.

For financial assets that are neither past due nor impaired, The Entity believes that the assets are recoverable in full amount. On the other hand, for financial assets that are past due, The Entity believes that allowance for decline in value is sufficient to cover the uncollectibility of that financial assets.

25. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) ***25. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK (Continued)***

b. Manajemen risiko keuangan (Lanjutan) ***b. Financial risk management (Continued)***

	2025				
	Belum jatuh tempo/Neither *past due*	**Telah jatuh tempo**/*Past due*	**Penurunan nilai**/ *Impairment*	**Jumlah**/*Total*	
Aset lancar					***Current assets***
Kas di bank	63.173.200.609	-	-	63.173.200.609	*Cash in banks*
Piutang usaha	122.803.973.216	-	-	122.803.973.216	*Trade receivables*
Jumlah	**185.977.173.825**	**-**	**-**	**185.977.173.825**	***Total***

	2024				
	Belum jatuh tempo/Neither *past due*	**Telah jatuh tempo**/*Past due*	**Penurunan nilai**/ *Impairment*	**Jumlah**/*Total*	
Aset lancar					***Current assets***
Kas di bank	47.969.082.632	-	-	47.969.082.632	*Cash in banks*
Piutang usaha	77.237.121.561	-	-	77.237.121.561	*Trade receivables*
Jumlah	**125.206.204.193**	**-**	**-**	**125.206.204.193**	***Total***

Manajemen risiko likuiditas

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada manajemen, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk pengelolaan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Entitas dan persyaratan manajemen likuiditas.

Entitas mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan, dan dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual, dan dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Liquidity risk manajemen

Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the management, which has established an appropriate liquidity risk management framework for the management of The Entity's short, medium and long-term funding and liquidity management requirements.

The Entity manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and reserves borrowing facilities, and by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

Tabel risiko likuiditas

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif dengan periode pembayaran yang disepakati Entitas. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang tak terdiskonto dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal dimana Entitas dapat diminta untuk membayar. Tabel mencakup arus kas pokok. Jatuh tempo kontraktual didasarkan pada tanggal terawal dimana Entitas mungkin akan diminta untuk membayar.

Liquidity rate risks table

The following table details The Entity's remaining contractual maturity for its non-derivative financial liabilities with agreed repayment periods. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which The Entity can be required to pay. The table includes principal cash flows. The contractual maturity is based on the earliest date on which The Entity may be required to pay.

	2025				
	Belum jatuh tempo/Neither *Past due*	***Telah jatuh tempo***/*Past due*	***Penurunan nilai***/ *Impairment*	***Jumlah***/*Total*	
Liabilitas Lancar					***Current liabilities***
Utang usaha :					*Trade payables :*
Pihak ketiga	39.757.569.758	-	-	39.757.569.758	*Third parties*
Phak berelasi	3.492.483.696	-	-	3.492.483.696	*Related parties*
Beban akrual	65.801.145.406	-	-	65.801.145.406	*Accrued expenses*
Utang pajak	10.685.603.177	-	-	10.685.603.177	*Taxes payables*
Pendapatan ditangguhkan	1.967.750.000	-	-	1.967.750.000	*Deferred revenue*
Liabilitas tidak lancar					***Non-current liabilities***
Pendapatan yang ditangguhkan	983.875.000	-	-	983.875.000	*Deferred revenue*
Jumlah	**122.688.427.037**	**-**	**-**	**122.688.427.037**	***Total***

25. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Manajemen risiko keuangan (Lanjutan)

25. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK (Continued)

b. Financial risk management (Continued)

	2024				
	Belum jatuh tempo/Neither *Past due*	***Telah jatuh tempo**/ Past due*	***Penurunan nilai**/ Impairment*	***Jumlah**/ Total*	
Liabilitas Lancar					***Current liabilities***
Utang usaha :					*Trade payables :*
Pihak ketiga	56.103.808.045	-	-	56.103.808.045	*Third parties*
Phak berelasi	1.692.742.899	-	-	1.692.742.899	*Related parties*
Beban akrual	5.139.055.885	-	-	5.139.055.885	*Accrued expenses*
Utang pajak	13.239.563.460	-	-	13.239.563.460	*Taxes payables*
Pendapatan ditangguhkan	1.967.750.000	-	-	1.967.750.000	*Deferred revenue*
Liabilitas tidak lancar					***Non-current liabilities***
Pendapatan yang ditangguhkan	2.951.625.000	-	-	2.951.625.000	*Deferred revenue*
Jumlah	**81.094.545.289**	**-**	**-**	**81.094.545.289**	***Total***

26. PERJANJIAN PENTING

26. SIGNIFICANT AGREEMENT

a. Perjanjian penyaluran pendanaan

a. Funding disbursement agreement

Pada tanggal 5 Desember 2020 Perusahaan mengadakan perjanjian penyaluran pinjaman dengan Doctor Dana Limited yang beralamat di Flat/Rm 502 5/F Union Park Tower 168 Electric RD HK di Hongkong dengan nomor kontrak 9575859 yang diwakili oleh Zhang Zepeng selaku Direktur.

On December 5, 2020, The Company entered into a loan agreement with Doctor Dana Limited, which is located at Flat / Rm 502 5 / F Union Park Tower 168 Electric RD HK in Hong Kong with contract number 9575859 represented by Zhang Zepeng as Director.

Pada tanggal 1 Agustus 2021 Perusahaan mengadakan perjanjian penyaluran pinjaman dengan Nexus Digital Technologies Limited d/h Doctor Dana Limited yang beralamat di Flat/Rm 502 5/F Union Park Tower 168 Electric RD HK di Hongkong yang disepakati dengan perjanjian nomor 22A/PKS-ITS/VIII/2021 yang diwakili oleh Wang Yige selaku direktur.

On August 1, 2021, The Company entered into a loan agreement with Nexus Digital Technologies Limited formerly Doctor Dana Limited, which is located at Flat / Rm 502 5 / F Union Park Tower 168 Electric RD HK in Hong Kong which was agreed upon by agreement number 22A/PKS-ITS /VIII/2021 represented by Wang Yige as director.

Pada tanggal 5 November 2021 Perusahaan dan NDTL melakukan perubahan perjanjian berdasarkan Addendum Perjanjian No 34B/PKS-ITS/XI/2021 mengenai perubahan tingkat suku bunga harian menjadi 0,4% per hari.

As of November 5, 2021, The Company and NDTL amending the agreement based on Addendum loan agreement No 34B/PKS-ITS/XI/2021regarding changes on daily interest loan become 0,4% per day.

Pada tanggal 29 April 2022 Perusahaan dan NDTL melakukan perubahan perjanjian berdasarkan Addendum Perjanjian No 001D/ADD-ITS/IV/2022 mengenai perubahan rincian komposisi suku bunga harian.

As of April 29, 2022, The Company and NDTL amending the agreement based on Addendum loan agreement No 001D/ADD-ITS/IV/2022 regarding changes on details of daily interest rate composition.

Pada tanggal 14 Maret 2024, Perusahaan mengadakan perjanjian kerja sama Penyaluran Pendanaan dengan Stardana PTE. LTD. Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Pendanaan ini dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama No. 07/PKS-ITS/III/2024.

On March 14, 2024, the Company entered into a Funding Disbursement cooperation agreement with Stardana PTE. LTD. This Funding Distribution Cooperation Agreement is set forth in a cooperation agreement letter No. 07/PKS-ITS/III/2024.

Pada tanggal 15 Maret 2024, Perusahaan mengadakan addendum perjanjian kerja sama Penyaluran Pendanaan dengan Stardana PTE. LTD. Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Pendanaan ini dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama No. 04B/ADD-ITS/III/2024 dan No. 0I/SD-AD/III/24.

On March 15, 2024, the Company entered into an addendum to the Funding Cooperation Agreement with Stardana PTE. LTD. This Funding Distribution Cooperation Agreement is set forth in the cooperation agreement letter No. 04B/ADD-ITS/III/2024 and No. 0I/SD-AD/III/24.

Pada tanggal 13 Januari 2025, Perusahaan mengadakan perjanjian kerja sama Penyaluran Pendanaan dengan Matrix Digital Technologies Limited. Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Pendanaan ini dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama No. 02/AGR-MDTL/I/2025 dan No. 02A/PKS-ITS/I/2025.

On January 13, 2025, the Company entered into a funding distribution cooperation agreement with Matrix Digital Technologies Limited. This funding distribution cooperation agreement is set forth in cooperation agreement letters No. 02/AGR-MDTL/I/2025 and No. 02A/PKS-ITS/I/2025.

b. Perjanjian kerja sama fasilitas channeling

b. Channeling facility cooperation agreement

Pada tanggal 19 Januari 2023, Perusahaan mengadakan perjanjian kerja sama Channeling dengan PT Bank Sahabat Sampoerna. Jangka waktu kerja sama ini selama 12 (dua belas) bulan dimulai sejak tanggal perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak yang akan dituangkan dalam adddendum Perjanjian. Plafon dalam kerja sama ini adalah maksimal Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah).

On January 19, 2023, the Company entered into a Channeling cooperation agreement with PT Bank Sahabat Sampoerna. The period of this cooperation is 12 (twelve) months starting from the date of this Agreement and can be extended based on the Agreement of the parties, which will be stated in the addendum to the Agreement. The ceiling in this cooperation is not to exceed IDR 150,000,000,000 (one hundred fifty billion rupiahs).

Pada tanggal 06 Juni 2023, Perusahaan mengadakan perjanjian kerja sama Channeling dengan PT Bank Neo Commerce Tbk. Jangka waktu kerja sama ini selama 12 (dua belas) bulan dimulai sejak tanggal perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak yang akan dituangkan dalam adddendum Perjanjian. Plafon dalam kerja sama ini adalah maksimal Rp625.000.000.000,- (enam ratus dua puluh lima miliar rupiah).

On June 6 2023, the Company entered into a Channeling cooperation agreement with PT Bank Neo Commerce Tbk. The term of this cooperation is 12 (twelve) months starting from the date of this agreement and can be extended based on the agreement of the parties which will be stated in the addendum to the Agreement. The ceiling in this collaboration is a maximum of IDR625,000,000,000,- (six hundred twenty-five billion rupiah).

26. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

b. Perjanjian kerja sama fasilitas channeling (Lanjutan)

Pada tanggal 28 Oktober 2024, dilakukan Amandemen atas perjanjian dengan No. ITS:13/ADD-ITS/X/2024 dan PKS/248/BNC-LEG/X/2024 untuk menambah limit plafon menjadi sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah). Jangka waktu perjanjian diperpanjang dan berlaku hingga tanggal 3 Juni 2025.

Pada tanggal 30 Juli 2025 dilakukan perubahan dan pernyataan kembali perjanjian kerja sama dengan no. 43/ADD-ITS/VII/2025 dan PKS/186/BNC-LEG/VII/2025.

Pada tanggal 27 Juni 2023, Perusahaan mengadakan perjanjian kerja sama Channeling dengan PT Bank Amar Indonesia Tbk. Jangka waktu kerja sama ini selama 12 (dua belas) bulan dimulai sejak tanggal perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis oleh para Pihak. Plafon dalam kerja sama ini adalah maksimal Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah). Kerja sama Channeling ini dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Nomor 12/PKS-ITS/VI/2023 dan Nomor 087/CA/AB/VI/2023.

Pada tanggal 20 Juli 2023, Perusahaan mengadakan perjanjian kerja sama Channeling dengan PT Bank Seabank Indonesia. Jangka waktu kerja sama ini selama 36 (tiga puluh enam) bulan dimulai sejak tanggal perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak yang akan dituangkan secara tertulis. Plafon dalam kerja sama ini adalah maksimal Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah). Kerja sama Channeling ini dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Nomor 14/PKS/ITS/VII/2023 dan Nomor 076/2023/PER.

Pada tanggal 05 Januari 2024, Perusahaan mengadakan perjanjian kerja sama Channeling dengan PT Bank DBS Indonesia. Jangka waktu kerja sama ini selama 12 (dua belas) bulan dimulai sejak tanggal perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak yang akan dituangkan dalam adddendum Perjanjian. Plafon dalam kerja sama ini adalah maksimal Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah). Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Channeling ini dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama nomor 14925/DBSI-CBG/XII/2023 dan nomor 24/PKS/ITS/XII/2023.

Pada tanggal 28 Oktober 2024, dilakukan Amandemen atas perjanjian dengan No.23A/PKS-ITS/VIII/2024 untuk menambah limit plafon menjadi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).

PT Bank DBS Indonesia dan Perusahaan mengubah dan menambah ketentuan dalam perjanjian kerja sama fasilitas channeling yang sudah ada sebelumnya. Surat perjanjian dibuat tanggal 3 Februari 2025 pada surat perubahan no. 08/PKS-ITS/II/2025 dan 15439/DBS/CBG/II/2025.

PT Bank DBS Indonesia dan Perusahaan melanjutkan perubahan pada perjanjian kerja sama fasilitas channeling elanjutan dari perjanjian awal (Januari 2024) dan rangkaian adendum sebelumnya (Perubahan 1 hingga 3) untuk menambah limit plafon menjadi Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah).Surat perjanjian dibuat tanggal 10 Juli 2025 pada surat perubahan no. 42/ADD-ITS/VII/2025 dan 155051/DBS/CBG/VII/2025.

Pada tanggal 31 Januari 2024, Perusahaan mengadakan perjanjian kerja sama Channeling dengan PT Bank Digital BCA. Jangka waktu kerja sama ini berlaku efektif sejak tanggal pendatanganan dan akan berlaku terus menerus sampai adanya pengakhiran dari salah satu pihak. Plafon dalam kerja sama ini adalah maksimal Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah). Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Channeling ini dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama nomor 085/HKM/PKS/LBPM/I/2024 dan Nomor 02/PKS-ITS/I/2024.

Pada tanggal 05 Maret 2024, Perusahaan mengadakan perjanjian kerja sama Channeling dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Jangka waktu kerja sama ini adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal efektif dan akan direview berkala setiap tahunnya. Plafon dalam kerja sama ini adalah maksimal Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah). Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Channeling ini dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama nomor B.02/CL/USB/P2P/PKS/0124 dan Nomor 06/PKS-ITS/III/2024.

Pada tanggal 27 Juni 2024, Perusahaan mengadakan perjanjian kerja sama Channeling dengan PT Super Bank Indonesia. Jangka waktu kerja sama ini adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal efektif dan akan direview berkala setiap tahunnya. Plafon dalam kerja sama ini adalah maksimal Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah). Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Channeling ini dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama nomor No. 151 /AGR/LENDING/SBNI/2024 dan No. 17/PKS-ITSNI/2024 .

Pada tanggal 2 Desember 2024, dilakukan Amandemen dengan No.22/ADD-ITS/XI/2024 dan No.335/AGR/SB/XII/2024 untuk menambah limit plafon menjadi sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah). Jangka waktu perjanjian diperpanjang dan berlaku hingga tanggal 2 Desember 2025.

26. SIGNIFICANT AGREEMENT *(Continued)*

b. Channeling facility cooperation agreement *(Continued)*

On 28 October 2024, an Amendment was made to the agreement No. ITS:13/ADD-ITS/X/2024 and PKS/248/BNC-LEG/X/2024 to increase the credit limit to IDR750,000,000,000,- (seven hundred fifty billion rupiah). The term of the agreement was extended and is valid until 3 June 2025.

On July 30, 2025, amendments were made to and the cooperation agreement was reaffirmed under No. 43/ADD-ITS/VII/2025 and PKS/186/BNC-LEG/VII/2025.

On June 27 2023, the Company entered into a Channeling cooperation agreement with PT Bank Amar Indonesia Tbk. The term of this cooperation is 12 (twelve) months starting from the date of this agreement and can be extended based on written agreement by the Parties. The ceiling in this collaboration is a maximum of IDR25,000,000,000 (twenty five billion rupiah) This Channeling cooperation is outlined in the Facility Cooperation Agreement Letter Number 12/PKS-ITS/VI/2023 and Number 087/CA/AB/VI/2023.

On July 20 2023, the Company entered into a Channeling cooperation agreement with PT Bank Seabank Indonesia. The term of this cooperation is 36 (thirty six) months starting from the date of this agreement and can be extended based on the agreement of the parties which will be stated in writing. The ceiling in this collaboration is a maximum of IDR200,000,000,000 (two hundred billion rupiah). This Channeling cooperation is outlined in the Facility Cooperation Agreement Letter Number 14/PKS/ITS/VII/2023 and Number 076/2023/PER.

On January 5, 2024, the Company entered into a Channeling cooperation agreement with PT Bank DBS Indonesia. The term of this cooperation is 12 (twelve) months starting from the date of this agreement and can be extended based on the agreement of the parties which will be stated in the addendum to the Agreement. The ceiling in this collaboration is a maximum of IDR 200,000,000,000 (two hundred billion rupiah).This Channeling Facility Cooperation Agreement is outlined in cooperation agreement letters number 14925/DBSI-CBG/XII/2023 and number 24/PKS/ITS/XII/2023.

On 28 October 2024, an Amendment was made to the agreement No.23A/PKS-ITS/VIII/2024 to increase the credit limit to IDR500,000,000,000,- (five hundred billion rupiah).

PT Bank DBS Indonesia and the Company have amended and supplemented the terms of the existing channeling facility cooperation agreement. The agreement was executed on February 3, 2025, as set forth in Amendment Letters No. 08/PKS-ITS/II/2025 and 15439/DBS/CBG/II/2025.

PT Bank DBS Indonesia and the Company have amended the channeling facility cooperation agreement, building upon the initial agreement (January 2024) and the previous series of addenda (Amendments 1 through 3), to increase the credit limit to Rp 1,000,000,000,000 (one trillion rupiah). The agreement was executed on July 10, 2025, under Amendment No. 42/ADD-ITS/VII/2025 and 155051/DBS/CBG/VII/2025.

On January 31, 2024, the Company entered into a Channeling cooperation agreement with PT Bank Digital BCA. This cooperation period is effective from the date of arrival and will continue to apply until termination by either party. The ceiling in this collaboration is a maximum of IDR300,000,000,000 (three hundred billion rupiah). This Channeling Facility Cooperation Agreement is stated in cooperation agreement letters number 085/HKM/PKS/LBPM/I/2024 and Number 02/PKS-ITS/I/2024.

On March 5, 2024, the Company entered into a Channeling cooperation agreement with PT Bank Danamon Indonesia Tbk. The term of this collaboration is 36 (thirty six) months starting from the effective date and will be reviewed periodically every year. The ceiling in this collaboration is a maximum of IDR500,000,000,000 (five hundred billion rupiah). This Channeling Facility Cooperation Agreement is stated in cooperation agreement letters number B.02/CL/USB/P2P/PKS/0124 and Number 06/PKS-ITS/III/2024.

On March 5, 2024, the Company entered into a Channeling cooperation agreement with PT Super Bank Indonesia. The term of this collaboration is 12 (twelve) months starting from the effective date and will be reviewed periodically every year. The ceiling in this collaboration is a maximum of IDR200,000,000,000 (two hundred billion rupiah). This Channeling Facility Cooperation Agreement is stated in cooperation agreement letters number No. 151 /AGR/LENDING/SBNI/2024 and No. 17/PKS-ITSNI/2024.

On 2 December 2024, an Amendment was made with No. ITS:13/ADD-ITS/X/2024 and No.335/AGR/SB/XII/2024 to increase the credit limit to IDR600,000,000,000,- (six hundred billion rupiah). The term of the agreement was extended and is valid until 2 December 2025.

26. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

b. Perjanjian kerja sama fasilitas channeling (Lanjutan)

Pada tanggal 3 Februari 2025, dilakukan Amandemen dengan No.29/ADD-ITS/II/2025 dan No.059/ADD/LENDING/SB/I/2025 untuk pendanaan 12 bulan. Jangka waktu perjanjian diperpanjang dan berlaku hingga tanggal 3 Februari 2026.

Pada tanggal 17 Maret 2025, dilakukan Amandemen dengan No.31/ADD-ITS/III/2025 dan No.104/ADD/LENDING/SB/III/2025 untuk menambah limit plafon menjadi sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah). Jangka waktu perjanjian diperpanjang dan berlaku hingga tanggal 17 Maret 2026.

Pada tanggal 29 Agustus 2024, Perusahaan mengadakan perjanjian kerja sama Channeling dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Jangka waktu kerja sama adalah 12 (dua belas) bulan dihitung sejak proses *User Acceptance Test* (UAT) ini dinyatakan selesai dan akan direview berkala setiap tahunnya. Plafon dalam kerja sama ini adalah maksimal Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah). Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Channeling ini dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama nomor No.0010/PKS/KR/2024 dan No.25/PKS-ITSNI/2024.

c. Perjanjian kerja sama asuransi kredit

Pada tanggal 3 Juni 2023, Perusahaan mengadakan perjanjian kerja sama Asuransi Kredit dengan PT Asuransi Simas Insurtech. Objek pertanggungan adalah nilai tagihan atas pinjaman yang tidak dibayarkan lebih dari 30 hari kalender. Nilai pertanggungan sebesar maksimal Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) / pinjaman. Nilai ganti rugi sebesar penggantian yang akan diberikan untuk risiko gagal bayar adalah maksimal 100% dari sisa tagihan yang belum dilunasi, maksimal sesuai nilai pertanggungan pada polis. Perjanjian Kerja Sama tentang Asuransi Kredit ini dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama nomor 014/PKS-MKT/ASI-ITS/VI/2023 dan nomor 09/PKS-ITS/VI/2023.

Pada tanggal 4 Juni 2024, dilakukan Amandemen dengan No. ITS:07/ADD-ITS/VI/2024 dan 005/ADD-MKT/ASI-ITS/VI/2024 untuk menambah ketentuan tarif premi menjadi beberapa paket dengan rentang tarif sesuai dengan yang tertera di dalam lampiran perjanjian. Jangka waktu perjanjian diperpanjang dan berlaku hingga tanggal 3 Juni 2026.

Pada tanggal 30 Desember 2024, Perusahaan mengadakan perjanjian kerja sama Program Penutupan Asuransi dengan PT Citra International Underwriters. Objek pertanggungan adalah nilai tagihan atas pinjaman yang tidak dibayarkan lebih dari 90 hari kalender. Nilai pertanggungan sebesar maksimal Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) / pinjaman. Nilai ganti rugi sebesar penggantian yang akan diberikan untuk risiko gagal bayar adalah maksimal 75% dari sisa tagihan yang belum dilunasi, maksimal sesuai nilai pertanggungan pada polis. Perjanjian Kerja Sama tentang Asuransi Kredit ini dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama nomor 95/Lgl.PKS/CIU-ADAPUNDI/XII/2024 dan nomor 37/PKS-ITS/XII/2024.

PT Asuransi Intra Asia dan Perusahaan melakukan Kerja sama pemberian perlindungan asuransi terhadap risiko gagal bayar pinjaman yang disalurkan melalui platform Pihak Kedua. Surat perjanjian dibuat tanggal 22 April 2025 pada surat perubahan no. 38/PKS-ITS/IV/2025 dan 017/AIA/I/LEGAL-PKS/0425.

26. SIGNIFICANT AGREEMENT *(Continued)*

b. Channeling facility cooperation agreement *(Continued)*

On February 3, 2025, Amendments No. 29/ADD-ITS/II/2025 and No. 059/ADD/LENDING/SB/I/2025 were executed for a 12-month financing period. The term of the agreement was extended and remains in effect until February 3, 2026.

On March 17, 2025, Amendments No. 31/ADD-ITS/III/2025 and No. 104/ADD/LENDING/SB/III/2025 were executed to increase the credit limit to Rp750,000,000,000 (seven hundred fifty billion rupiah). The term of the agreement was extended and remains in effect until March 17, 2026.

On August 29, 2024, the Company entered into a Channeling cooperation agreement with PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. The term of this collaboration is 12 (twelve) months starting from the completion of and will be reviewed periodically every year. The ceiling in this collaboration is a maximum of IDR500,000,000,000 (five hundred billion rupiah). This Channeling Facility Cooperation Agreement is stated in cooperation agreement letters number No.0010/PKS/KR/2024 dan No.25/PKS-ITSNI/2024.

c. Credit insurance cooperation agreement

On June 3 2023, the Company entered into a Credit Insurance cooperation agreement with PT Asuransi Simas Insurtech. The object of coverage is the value of claims for loans that have not been paid for more than 30 calendar days. The maximum coverage value is IDR 2,000,000,000 (two billion Rupiah) / loan. The amount of compensation that will be given for the risk of failure to pay is a maximum of 100% of the remaining unpaid balance, the maximum is according to the insurance value in the policy. This Cooperation Agreement on Credit Insurance is stated in cooperation agreement letters number 014/PKS-MKT/ASI-ITS/VI/2023 and number 09/PKS-ITS/VI/2023.

On 4 June 2024, an Amendment was made with No. ITS:07/ADD-ITS/VI/2024 and 005/ADD-MKT/ASI-ITS/VI/2024 to add the terms and conditions regarding premium rate according to the appendix attached in the agreement. The term of the agreement was extended and is valid until 3 June 2026.

On December 30, 2024, the Company entered into a Credit Insurance cooperation agreement with PT Citra International Underwriters. The object of coverage is the value of claims for loans that have not been paid for more than 90 calendar days. The maximum coverage value is IDR 2,000,000,000 (two billion Rupiah) / loan. The amount of compensation that will be given for the risk of failure to pay is a maximum of 75% of the remaining unpaid balance, the maximum is according to the insurance value in the policy. This Cooperation Agreement on Credit Insurance is stated in cooperation agreement letters number 95/Lgl.PKS/CIU-ADAPUNDI/XII/2024 and nomor 37/PKS-ITS/XII/2024.

PT Asuransi Intra Asia and the Company have entered into a partnership to provide insurance coverage against the risk of loan defaults on loans disbursed through the Second Party's platform. The agreement was executed on April 22, 2025, as set forth in Amendment Letters No. 38/PKS-ITS/IV/2025 and 017/AIA/I/LEGAL-PKS/0425.

27. ESCROW ACCOUNT

27. ESCROW ACCOUNT

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2025	2024	
Saldo Awal			***Beginning balance***
Hak Lender	56.593.771.584	20.930.946.111	*Owned by Lender*
Hak Borrower	42.803.995.797	8.162.033.273	*Owned by Borrower*
Hak Penyelenggara	2.905.231.338	15.573.617.777	*Owned by The Company*
Hak Pihak Ketiga	35.911.474.471	58.074.191.906	*Owned by The Third Party*
Sub jumlah	**138.214.473.190**	**102.740.789.067**	***Sub total***
Kenaikan (Penurunan)			***Inreasement (Decreasement)***
Hak Lender	(11.912.361.110)	35.662.825.473	*Owned by Lender*
Hak Borrower	(12.918.015.573)	34.641.962.524	*Owned by Borrower*
Hak Penyelenggara	4.013.882.081	(12.668.386.439)	*Owned by The Company*
Hak Pihak Ketiga	115.876.829.513	(22.162.717.435)	*Owned by The Third Party*
Sub jumlah	**95.060.334.911**	**35.473.684.123**	***Sub total***
Hak Lender	44.681.410.474	56.593.771.584	*Owned by Lender*
Hak Borrower	29.885.980.224	42.803.995.797	*Owned by Borrower*
Hak Penyelenggara	6.919.113.419	2.905.231.338	*Owned by The Company*
Hak Pihak Ketiga	151.788.303.984	35.911.474.471	*Owned by The Third Party*
Jumlah saldo escrow account	**233.274.808.101**	**138.214.473.190**	***Total escrow account balance***

28. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU (REVISI)

Amendemen dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan selama tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Perusahaan bermaksud untuk menerapkan amendemen dan penyesuaian PSAK tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

Diterapkan pada tahun 2023

- Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap": Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan.

  Amendemen tersebut melarang entitas untuk mengurangi biaya perolehan aset tetap dari penerimaan dari penjualan yang dihasilkan oleh aset tetap sebelum penggunaan yang diintensikan. Penerimaan atas penjualan memenuhi definisi pendapatan dan oleh karena itu harus diakui dalam laba rugi.

- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan": Definisi Estimasi Akuntansi.

  Amendemen tersebut memperkenalkan definisi 'estimasi akuntansi' dan mengklarifikasi perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amendemen tersebut juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

- Amendemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan": Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal.

  Amendemen ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya sebagai contoh dari transaksi sewa, untuk mengeliminasi perbedaan praktik saat ini atas transaksi tersebut dan transaksi lain yang serupa.

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2024

- Amendemen PSAK 107, "Akuntansi Ijarah"

  Revisi ini untuk mengakomodasi perkembangan bisnis syariah, tidak hanya pada sektor keuangan tetapi juga pada sektor riil yang menggunakan pengaturan ijarah.

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan": Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan.

  Entitas menerapkan amendemen PSAK 1 (Oktober 2020) tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang pada periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25. Jika entitas menerapkan amendemen PSAK 1 (Oktober 2020) pada periode yang lebih awal setelah terbitnya amendemen PSAK 1 (Desember 2022) tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan, maka entitas juga menerapkan amendemen PSAK 1 (Desember 2022) pada periode tersebut. Jika entitas menerapkan amendemen PSAK 1 (Oktober 2020) untuk periode sebelumnya, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan": Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang.

  Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" mengklarifikasi bahwa kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar, berdasarkan pada hak yang ada pada akhir periode pelaporan. Klasifikasi tidak terpengaruh oleh ekspektasi entitas atau peristiwa setelah tanggal pelaporan (misalnya penerimaan waiver atau pelanggaran perjanjian). Amendemen tersebut juga mengklarifikasi apa yang dimaksud PSAK 1 perihal 'penyelesaian' liabilitas.

  Amendemen tersebut dapat memengaruhi klasifikasi liabilitas, terutama untuk entitas yang sebelumnya mempertimbangkan intensi manajemen untuk menentukan klasifikasi dan untuk beberapa liabilitas yang dapat dikonversi menjadi ekuitas.

- Amendemen PSAK 73, "Sewa": Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik

28. NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (REVISED)

Amendments and new Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) that have been approved by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) - Indonesian Institute of Accountants (IAI) but are yet to be in force effective for the financial statements during the year are disclosed below. Company means applying amendments and adjustments to the PSAK if deemed relevant when they have been effective.

Implemented in 2023

- *Amendments to PSAK 16, "Property, Plant and Equipment": Proceeds before Intended Use.*

  The amendments prohibit an entity from deducting from the cost of a property, plant and equipment the proceeds received from selling items produced by the property, plant and equipment before it is ready for its intended use. The sales proceeds would have met the revenue definition and therefore should be recognized in profit or loss.

- *Amendments to PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Accounting Estimates.*

  The amendment introduces a definition of 'accounting estimates' and clarify the distinction between changes in accounting estimates and changes in accounting policies and the correction of errors. Also, they clarify how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.

- *Amendments to PSAK 46, "Income Taxes": Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction.*

  This amendment proposes that entities recognize deferred tax assets and liabilities at the time of initial recognition, for example from a lease transaction, to eliminate differences in current practice for such transactions and similar transactions.

Issued but not yet effective

Amendments to financial accounting standards issued that are mandatory for the financial year beginning or after:

January 1, 2024

- *Amendments to PSAK 107, "Ijarah Accounting"*

  The revision is to accommodate the development in the sharia business, not only on the financial sector but also the real sector which use ijarah arrangement.

- *Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements": Non-current Liabilities with Covenants.*

  Entities apply retrospectively amendments to PSAK 1 (October 2020) regarding the classification of a liability as current or non-current for financial reporting starting on or after January 1, 2024 in accordance with PSAK 25. If entities apply the amendments to PSAK 1 (October 2020) in a period that is earlier after the issuance of the amendment to PSAK 1 (December 2022) regarding non-current liabilities with covenants, entities also apply the amendment to PSAK 1 (December 2022) in that period. If entities apply the amendments to PSAK 1 (October 2020) for the previous period, the entity shall disclose this fact.

- *Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements": Classification of Liabilities as Current or Non-current.*

  The narrow-scope amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements" clarify that liabilities are classified as either current or non-current, depending on the rights that exist at the end of the reporting period. Classification is unaffected by the expectations of the entity or events after the reporting date (e.g the receipt of a waiver or a breach of covenant). The amendments also clarify what PSAK 1 means when it refers to the 'settlement' of a liability.

  The amendments could affect the classification of liabilities, particularly for entities that previously considered management's intentions to determine classification and for some liabilities that can be converted into equity.

- *Amendments to PSAK 73, "Leases": Lease Liabilities in Sale-and-leaseback Transactions*

28. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU (REVISI) (Lanjutan)

Amendemen ini menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

- Perubahan Penomoran PSAK dan ISAK dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

  Sejalan dengan pengesahan Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia pada 12 Desember 2022, DSAK juga mengesahkan perubahan penomoran Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

  Perubahan tersebut untuk membedakan penomoran PSAK dan ISAK yang merujuk pada International Financial Reporting Standards (IFRS) (diawali dengan angka 1 dan 2) dan tidak merujuk pada IFRS (diawali dengan angka 3 dan 4).

- Amendemen PSAK 2 dan PSAK 60: Pengaturan Pembiayaan Pemasok

  Amendemen ini mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok terkait. Persyaratan pengungkapan dalam amendemen ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas.

1 Januari 2025

- Amendemen PSAK 10: Kekurangan Ketertukaran

  Ketika kondisi ekonomi suatu negara memburuk, misalnya hiperinflasi, akan menyebabkan kesulitan dalam menentukan apakah mata uang negara yang bersangkutan tertukarkan menjadi mata uang lain serta kurs yang digunakan ketika mata uang tersebut tidak tertukarkan. Amandemen ini menetapkan cara menilai apakah suatu mata uang adalah tertukarkan dan bagaimana menentukan nilai tukar spot jika mata uang tersebut tidak tertukarkan. Amandemen ini juga mensyaratkan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami dampak dari mata uang yang tidak tertukarkan.

- PSAK No. 74 tentang "Kontrak Asuransi", yang diadopsi dari IFRS 17, berlaku efektif 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 71 tentang "Instrumen Keuangan" dan PSAK 72 tentang "Pendapatan dan Kontrak dengan Pelanggan".

Perusahaan masih dalam proses melakukan evaluasi atas dampak dari amendemen dan PSAK baru tersebut di atas terhadap laporan keuangan Perusahaan.

28. NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (REVISED) (Continued)

This amendment specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognize any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains.

- *Changes in the Numbering of PSAK and ISAK in Indonesian Financial Accounting Standards*

  In line with the endorsement of the Indonesian Financial Reporting Standards Framework on December 12, 2022, DSAK has also authorized changes to the numbering of Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") in Indonesian Financial Accounting Standards.

  The change is to differentiate the numbering of PSAK and ISAK that refer to International Financial Reporting Standards (IFRS) (beginning with numbers 1 and 2) and those that do not refer to IFRS (beginning with numbers 3 and 4).

- *Amendments to PSAK 2 and PSAK 60: Supplier Finance Arrangements*

  These amendments clarify the characteristics of supplier finance arrangements and require additional disclosure of such arrangements. The disclosure requirements in the amendments are intended to assist users of financial statements in understanding the effects of supplier finance arrangements on an entity's liabilities, cash flows and exposure to liquidity risk.

January 1, 2025

- *Amendments to PSAK 10: Lack of Exchangeability*

  When a country's economic conditions deteriorate, such as hyperinflation, it can be difficult to determine whether the country's currency is exchangeable into another currency as well as the exchange rate used when the currency is not exchangeable. This amendment specify how to assess whether a currency is exchangeable and how to determine a spot exchange rate if it is not. It also requires disclosure of information that enables users of financial statements to understand the impact of a currency not being exchangeable.

- *PSAK No. 74 regarding "Insurance Contracts," which was adopted from IFRS 17, effective January 1, 2025, with early adoption permitted for entities that have also applied PSAK 71 concerning "Financial Instruments" and PSAK 72 regarding "Revenue and Contracts with Customers".*

The Company is still in the process of evaluating the impact of the amendments and the new PSAK mentioned above on the Company's financial statements.

29. REKLASIFIKASI AKUN

Laporan keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2024 dilakukan reklasifikasi akun untuk menyesuaikan akun pada laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025.

29. ACCOUNT RECLASSIFICATION

The company's financial report dated December 31, 2024, accounts were reclassified to adjust the accounts in the financial report dated December 31, 2025.

	Sebelum/ *Before*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Sesudah/ *After*	
LAPORAN POSISI KEUANGAN				*STATEMENTS OF FINANCIAL POSITIONS*
Piutang lain-lain				Other receivables
- Pihak ketiga	-	125.541.352	125.541.352	Third parties -
Aset lancar lainnya	125.541.352	(125.541.352)	-	Other current assets

30. PERISTIWA SETELAH NERACA

Perusahaan ditetapkan sebagai Terlapor XLIV dalam perkara dugaan pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 terkait layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (Fintech P2P Lending) di Indonesia. Objek perkara adalah dugaan kartel penetapan harga (bunga pinjaman) melalui pedoman perilaku AFPI tahun 2020 (maksimal 0,8% per hari) dan SK AFPI tahun 2021 (maksimal 0,4% per hari).

30. SUBSEQUENT EVENT

The company has been designated as Respondent XLIV in a case involving an alleged violation of Article 5 of Law No. 5 of 1999 regarding information technology-based peer-to-peer lending services (Fintech P2P Lending) in Indonesia. The subject of the case is an alleged price-fixing cartel (loan interest rates) through the 2020 AFPI Code of Conduct (maximum 0.8% per day) and the 2021 AFPI Decree (maximum 0.4% per day).

30. PERISTIWA SETELAH NERACA (Lanjutan)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan Perusahaan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. Perusahaan disanksi untuk membayar denda sebesar Rp10.600.000.000,- (sepuluh miliar enam ratus juta rupiah). Denda harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Jika mengajukan keberatan, Terlapor wajib menyerahkan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda paling lambat 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan. Keterlambatan pembayaran denda dikenakan denda tambahan sebesar 2% per bulan.

Perusahaan (sebagai Pemohon Keberatan II) telah mengajukan Upaya Hukum Keberatan berdasarkan dokumen no. 24/Misc/IV/26/NM melalui advokat Nurmalita Malik, S.H., M.H., ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 April 2026. Dengan diajukannya keberatan tersebut, Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dinyatakan belum final dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht*). Perusahaan secara tegas menolak putusan tersebut dengan alasan antara lain penetapan bunga merupakan inisiasi/arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tidak ada unsur penetapan harga (*price fixing*), dan besaran denda tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan.

30. SUBSEQUENT EVENT *(Continued)*

The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) has determined that the Company has been proven beyond a reasonable doubt to have violated Article 5 of Law No. 5 of 1999. The Company has been ordered to pay a fine of Rp10,600,000,000 (ten billion six hundred million rupiah). The fine must be deposited into the State Treasury as revenue from fines for violations in the field of business competition. If filing an objection, the Respondent is required to submit a bank guarantee amounting to 20% of the fine value no later than 14 days after receiving notification of the decision. Late payment of the fine will incur an additional penalty of 2% per month.

The Company (as the Second Objector) filed a legal objection based on document no. 24/Misc/IV/26/NM through attorney Nurmalita Malik, S.H., M.H., with the Commercial Court of the Central Jakarta District Court on April 8, 2026. With the filing of this objection, the Decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is deemed not yet final and does not yet have binding legal force (inkracht). The company firmly rejects the decision on the grounds that, among other things, the interest rate was set at the initiative/direction of the Financial Services Authority (OJK), there was no element of price fixing, and the amount of the fine did not take into account the company's financial capacity.

31. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 23 April 2026.

31. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Company is responsible for the preparation of the financial statements which were completed on April 23, 2026.